

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Valdo Maggri Alani

No. Mahasiswa : 18312259

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-
1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Valdo Maggri Alani

No. Mahasiswa: 18312259

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBEAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 18 Februari 2022

Penulis



METERAI
TEMPEL
CFAAAJX637065232

(Valdo Maggri Alani)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Valdo Maggri Alani

No. Mahasiswa: 18312259

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 17 Februari 2022

Dosen Pembimbing



(Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com.(SI), Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2021/2022, hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : VALDO MAGGRI ALANI
NIM : 18312259
Judul Tugas Akhir : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
Dosen Pembimbing : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFra.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A/B
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFra.
Anggota Tim : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D



Yogyakarta, 30 March 2022

Ketua Program Studi Akuntansi,

Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak., CMA
NIK. 023120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Disusun oleh : VALDO MAGGRI ALANI

Nomor Mahasiswa : 18312259

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 14 Maret 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D.,
CFra.

Penguji : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

HALAMAN MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Lapaoran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen**” dapat berjalan dengan baik. tak lupa shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan besar umat Muslim nabi Muhammad SAW beserta keluarga beserta sahabat beliau.

Penelitian skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis hendak memberikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran selama proses penyusunan skripsi

2. Kedua Orang Tua Penulis, Ibu Karyati dan Bapak Warsimin yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, kasih sayang tiada batas, material dan doa yang tiada henti untuk penulis. Orang Tua Penulis merupakan anugerah terindah bagi penulis.
3. Saudara-saudaraku Mas Alga, Mbak Reza, dan Adikku Raafi yang selalu memeberikan semangat dan doa disetiap waktu agar proses penyusunan skripsi diberikan kelancaran.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta segenap pimpinan universitas.
5. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, Dr. S.E., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika beserta seluruh jajaran dosen, pegawai, dan *staff* Program Studi Akuntansi
8. Bapak Dekar Urumsah, Drs.,S.Si.,M.Com.(SI),Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan motivasi, semangat, kesabaran, ilmu, waktu, dan arahnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi dan seluruh staff keluarga besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

10. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. *Beranjak Dewasa*: Agnes Aura Ainisha, Farhan Kamil Rabbani, Imerina Zuhara, dan Sekar Clarissa Shabrina yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, selalu ada dalam kondisi apapun, dan selalu mendoakan untuk kebaikan penulis.
12. Naufal Asyraf Rahman, Mas Vio, Naufal Hafidh yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis. Terimakasih karena selalu bersedia mendengarkan keluh kesah dan bersedia memberikan bantuan dengan tulus.
13. *Bukan Wacana*: Felia Apriani, Gita Nagiyanti, Deaa Putri Mirita, Budi Priyanto Romelan, terimakasih karena selalu mendukung dan memberikan semangat untuk penulis.
14. Teman-teman satu bimbingan skripsi yang saling mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.
15. Lucknut, Yulia Galuh Tantri, Fita Nur Aisyah, Fajar Aprian, Eko Arisna Setiawan, dan Tri Nur Wicaksono teman seperjuangan sejak SMP, terima kasih selalu memberikan motivasi, semangat dan doa agar mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh sahabat dan teman-teman keluarga besar Akuntansi UII angkatan 2018 dan semua pihak yang turut serta membantu penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat lebih lagi meningkatkan kemampuan berkarya yang lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 18 Februari 2022

Penulis

Valdo Maggri Alani

الجمعة الائمة الاندية
الاستد الاندية

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xixx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Sistematika Pembahasan	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 <i>Agency Theory</i>	12
2.2 Laporan Keuangan	13

2.2.1	Kualitas Laporan Keuangan.....	14
2.3	Faktor-Faktor yang Meiliki Pengaruh Pada Kualitas Laporan Keuangan	16
2.3.1	<i>Good Government Governance</i>	17
2.3.2	Sistem Pengendalian Internal.....	18
2.3.3	Standar Akuntansi Pemerintahan.....	19
2.3.4	Kompetensi Sumber Daya Manusia	20
2.3.5	Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	21
2.4	Penelitian Terdahulu.....	22
2.5	Pengembangan Hipotesis Penelitian	28
2.5.1	Pengaruh <i>Good Government Governance</i>	28
2.5.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal	29
2.5.3	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan.....	31
2.5.4	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia	32
2.5.5	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	33
2.6	Kerangka Penelitian	35
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1.	Metodologi Penelitian	36
3.2.	Populasi dan Sampel Penelitian	36
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	37
3.4.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	38
3.4.1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD).....	39
3.4.2	<i>Good Government Governance</i> (GGG).....	40
3.4.3	Sistem Pengendalian Internal (SPI).....	41

3.4.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	43
3.4.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)	44
3.4.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	45
3.5. Metode Analisis Data	46
3.5.1 Alat Analisis Data	46
3.5.2 Metode Pengukuran	47
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Hasil Pengumpulan Data	50
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian	50
4.1.2. Deskripsi Responden	52
4.2. Uji Kualitas Data	53
4.2.1. Model Partial Least Square (PLS)	53
4.2.2. Uji Validitas	53
4.2.3. Uji Reliabilitas	59
4.2.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	61
4.2.5. Uji <i>Goodness of Fit</i> (GoF).....	62
4.2.6. Uji Hipotesis	63
4.3. Pembahasan	64
4.3.1. Pengaruh <i>Good Government Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.....	64
4.3.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.....	65
4.3.3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.....	67

4.3.4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	68
4.3.5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.....	70
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Kontribusi dan Implikasi Penelitian.....	74
5.3. Keterbatasan dan Saran Penelitian	75
5.3.1. Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3.2. Saran Penelitian	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	40
Tabel 3.2 Indikator <i>Good Government Governance</i>	41
Tabel 3.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal.....	42
Tabel 3.4 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan.....	44
Tabel 3.5 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	45
Tabel 3.6 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	46
Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	51
Tabel 4.2 Daftar Distribusi Kuesioner.....	51
Tabel 4.3 Daftar Karakteristik Responden.....	52
Tabel 4.4 <i>Outer Loading</i> dan AVE.....	54
Tabel 4.5 <i>Cross Loading</i>	57
Tabel 4.6 <i>Composite Reliability</i> Dan <i>Cronbach's Alpha</i>	60
Tabel 4.7 <i>R-Square</i>	61
Tabel 4.8 <i>Goodness of Fit</i>	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	85
Lampiran 2 Daftar Rekapitulasi Jawaban Responden	95
Lampiran 3 Hasil Olah Data	117



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 110 responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah di Kabupaten Kebumen yang berjumlah 11 Perangkat Daerah. Teknik dalam pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan data yang dipergunakan adalah data primer, diperoleh dari responden yang telah mengisi kuesioner. Pengolahan data menggunakan PLS-SEM (*Partial Least Square-SEM*). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel *good government governance* dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, sedangkan variabel sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

Kata Kunci: *good government governance*, sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyse the factors that influence the quality of local government financial report in Kebumen Regency. The number of sample used in this study were 110 respondents. The population used in this study were regional apparatuses in Kebumen Regency amounting to 11 regional apparatuses. The technique in selecting samples uses purposive sampling and the data used are primary data, obtained from respondents who have filled out questionnaires. Data processing using PLS-SEM (Partial Least Square-SEM). The result of this study reveal that good government governance and utilization of information technology had a positive and significant effect on quality of local government financial report in Kebumen Regency, while the reconciliation and internal control system, government accounting standards, and human resource competency did not significantly influence on quality of local government financial report in Kebumen Regency.

Keywords: *good government governance, reconciliation and internal control system, government accounting standards, human resource competency, utilization of information technology, quality of local government financial report.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin tinggi atas pemerintahan yang baik dan berkualitas. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baik dapat dilihat dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan Keuangan adalah sebuah penyajian terstruktur yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja dari suatu unit organisasi (Pradono dan Basukianto, 2015). Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai indikator apakah suatu entitas atau unit organisasi berjalan dengan baik, sehingga pemerintah daerah diharuskan memiliki kemampuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan. Dalam penelitian Vidyasari (2021) Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif yang terdiri dari (1) Relevan yang berarti informasi keuangan mampu memengaruhi keputusan, (2) Mudah dipahami yang berarti informasi yang diberikan dapat dipahami oleh pengguna, (3) Andal, yang berarti informasi pada laporan keuangan dapat diandalkan dengan penyajian secara jujur, bebas dari kesalahan atau pengertian yang menyesatkan dan benar benar menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, (4) dapat dibandingkan yang berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dari periode sebelumnya atau dibandingkan dengan entitas yang sederajat.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selain itu juga,

karakteristik suatu laporan keuangan pemerintah merupakan persyaratan normatif yang dibutuhkan sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan hasil yang sesuai. Laporan keuangan harus dibuat secara maksimal agar mendapatkan pengelolaan hasil keuangan yang efektif. Apabila informasi yang terdapat di laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik kualitatif itu menandakan pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangan sudah dapat memberikan informasi yang berkualitas dan transparan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan pemerintah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif menjadi salah satu bentuk tanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah akan memberikan tanggungjawabnya atas penggunaan dana APBD kepada DPRD berupa informasi keuangan yang akan digunakan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi prinsip penyusunan agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Salah satu indikator laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan memenuhi karakteristik kualitatif yaitu dengan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pernyataan tertulis dari pihak manajemen pemerintah daerah yang memberikan informasi mengenai keadaan

keuangan pemerintah kepada pemangku *stakeholder* atau pemangku kepentingan (Syarifudin, 2014). Dalam hal ini pelaporan keuangan menjadi sumber informasi yang penting sehingga kewajaran dan kualitas atas laporan keuangan juga diperlukan supaya pengambilan keputusan tepat sasaran. Pada tahun 2019/2020 pemerintah daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan catatan dari BPK diantaranya mengenai pengelolaan aset tetap yang belum disajikan secara maksimal, pengelolaan belanja bantuan sosial, pengelolaan pada kas dan juga piutang, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengelolaan dana desa, dan kurangnya volume pekerjaan atas pelaksanaan belanja modal. Berdasar catatan dari BPK menandakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen masih ada kelemahan yang mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan tidak optimal.

Penelitian terkait kualitas laporan keuangan pemerintah telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan berbagai macam teori yang ada seperti *Agency Theory* (AT), *Stewardship Theory* (ST), *Resources Based Theory* (RBT) *Goal-setting theory* (GST). Pada penelitian Syarifudin (2014); dan Wati *et al.* (2014) menggunakan teori AT. Pada penelitian Ikriyati dan Aprila (2019); serta Yaqin dan Jatmiko (2018) menggunakan teori ST. penelitian yang dilakukan Nabila *et al.* (2020) menggunakan teori RBT. Sedangkan penelitian Widaryani dan Kiswanto (2020) menggunakan teori GST. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut, peneliti menggunakan kerangka *Agency Theory* (AT) dengan *good government governance*, sistem pengendalian intern, standar akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan

teknologi informasi untuk mempelajari mengenai dampak yang dihasilkan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

Good government governance (tata kelola pemerintah yang baik) harus tercapai dalam lembaga pemerintahan, dengan tidak adanya kesepakatan yang muncul dari komunikasi, kesejahteraan tidak akan bisa terwujud karena aspirasi dalam bidang politik dan ekonomi rakyat akan terhambat (Tullah *et al.*, 2018). Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik perlu didirikan interaksi antar pelaku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat umum, dan juga swasta. Dengan terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik diharapkan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga aspirasi dapat terlaksana dengan baik. Dari studi kasus pemerintahan daerah, penelitian Tullah *et al.* (2018) menunjukkan *good government governance* memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam hal transparansi dan akuntabilitas *good government governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Karena pemerintah sudah menuntaskan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan dana publik (Sholohah *et al.*, 2019).

Kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan seberapa baik pengendalian internal dijalankan dalam suatu entitas. Pengendalian internal merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mendeteksi, memantau dan menilai sumber daya, serta berperan secara aktif untuk mengatasi adanya kecurangan (Yaqin dan Jatmiko, 2018). Jika pengendalian internal dalam lembaga pemerintahan lemah maka kecurangan terhadap penyusunan laporan keuangan akan sangat sulit untuk diketahui. Sehingga penerapan sistem

pengendalian intern yang baik akan mengurangi kecurangan dan kesalahan dengan batas yang masih bisa diterima oleh lembaga pemerintahan. Sistem pengendalian internal dalam penelitian Yaqin dan Jatmiko (2018) ditetapkan sebagai jaminan tercapainya tujuan organisasi sehingga sistem pengendalian internal terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah melakukan pengendalian internal dengan melakukan aktivitas kontrol sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas (Ikriyati dan Aprila, 2019).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat sistem yang terdiri dari prosedur, kebijakan dan standar yang mengatur supaya menghasilkan laporan keuangan secara relevan, andal dan tepat waktu yang nantinya informasi keuangan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan oleh pihak internal dan eksternal dari pemerintah daerah (Gustina, 2021). SAKD menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan juga sebagai acuan dalam tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jika menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan relevan dan tepat waktu maka pengambilan keputusan yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah (Wati *et al.*, 2014). Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Ikriyati dan Aprila (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan SAP di lingkungan pemerintah, akan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas baik.

Laporan keuangan merupakan *output* yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, oleh karena itu untuk menghasilkan laporan keuangan dibutuhkan sumber daya yang memiliki kompetensi (Wati *et al.*, 2014). Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman mengenai keuangan daerah akan mempengaruhi pengolahan keuangan dan juga organisasional pemerintahan. Sehingga kompetensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam lingkungan organisasi, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang unggul berperan aktif dalam hasil akhir dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki saja akan tetapi juga kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia itu sendiri. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia itu sendiri maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin meningkat, sehingga kompetensi sumber daya manusia berperan aktif di dalamnya (Wati *et al.*, 2014). Dalam penelitian Pradono dan Basukianto (2015) terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan.

Penggunaan teknologi seperti era modern pada saat ini sudah menjadi kewajiban bagi entitas, teknologi informasi yang digunakan dapat mempermudah SDM dalam pengelolaan keuangan dan meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh manusia (Nabila *et al.*, 2020). Semakin canggih dan berkembangnya teknologi pada masa sekarang akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan guna meningkatkan produktivitasnya. Begitu juga dengan adanya teknologi informasi bisa menjadi alat bantu dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga berkurangnya kesalahan informasi keuangan yang

tertera pada laporan keuangan. Sehingga penerapan teknologi informasi diharapkan dapat mempermudah aktivitas sehingga laporan yang dihasilkan dapat disajikan tepat waktu dan berkualitas. Semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi akan mengefisienkan waktu dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehingga penggunaan teknologi informasi berperan aktif dalam peningkatan laporan keuangan yang berkualitas (Firdaus *et al.*, 2015). Dalam penelitian Nabila *et al.* (2020) menyatakan penggunaan teknologi informasi mampu meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, jadi penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya pada sampel yang digunakan, dalam penelitian kali ini menggunakan pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kebumen. Pada penelitian ini menggunakan *Agency Theory* sebagai dasar teori penelitian. Selain itu juga penelitian ini menambahkan variabel *good government governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini juga dilakukan untuk memberikan masukan bagi manajemen pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat menyajikan laporan yang berkualitas sehingga dapat memberikan informasi yang andal, relevan dan tepat waktu. Hal tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar uraian penjelasan dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan penelitian kali ini antara lain:

1. Apakah *Good Government Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen?
3. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen?
5. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Supaya mendukung agar tidak adanya kesalahpahaman mengenai penafsiran serta pengertian, oleh sebab itu diperlukan adanya batasan masalah pada penelitian ini. Fokus dari penelitian ini membahas mengenai berbagai macam faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan di antaranya adalah *good government governance*

(tata kelola pemerintah yang baik), sistem pengendalian intern, standar akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan juga pemanfaatan teknologi informasi yang ada di pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasar uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini adalah:

1. Menguji pengaruh *Good Government Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.
3. Untuk menguji pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.
4. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.
5. Untuk menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi mengenai wacana teoritis yang memiliki hubungan dengan beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Dan diharapkan penelitian ini menghasilkan wawasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga bisa diimplementasikan dalam teori dan maupun praktik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam ranah praktis terhadap pemerintah daerah dan peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan dan evaluasi terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- a. Pemerintah daerah, mampu memberikan saran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kebumen dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan ilmu mengenai *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- b. Peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan salah satu kajian pustaka untuk penelitian sejenis..

1.6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai landasan teori, kajian pustaka, uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji, serta kerangka model penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, dan metode analisis.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah diperoleh, serta pengujian dan pembahasan penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian yang telah dirasakan oleh peneliti, dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Agency Theory*

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan sebuah hubungan pada kontrak di mana satu individu atau kelompok (*principal*) memberikan wewenang kepada individu lain (agen) agar menjalankan pekerjaan dengan dasar prinsip dan memberikan tanggungjawab kepada individu lain (agen) agar menghasilkan kesepakatan terbaik untuk masyarakat (*principal*) (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan prinsipal dengan agen merupakan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Prinsipal memberikan pertanggungjawaban berupa wewenang pengaturan serta sumber daya kepada agen. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap prinsipal, agen memberikan sebuah laporan pertanggungjawaban. Sebab tidak mengetahui apa yang dilakukan agen secara riil maka prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang mampu menguji laporan yang dibuat oleh agen adalah benar.

Prinsip utama dalam teori agen merupakan hubungan kinerja antar pihak prinsipal (yang memberikan wewenang) dengan pihak agensi (yang menerima wewenang) dalam bentuk kerja sama atau biasa disebut dengan istilah *nexus of contract* (Syarifudin, 2014). Halim dan Abdullah (2006) pemerintah (agen) adalah pihak yang memiliki ikatan dengan prinsipal, oleh karena itu prinsipal menyerahkan sebagian kekuasaan kepada agen untuk menghasilkan kesepakatan demi kepentingan prinsipal. Otonomi daerah adalah bentuk pelaksanaan wewenang dari pemerintah kepada kepala daerah yang menunjukkan

adanya keterikatan keagenan. Pengaruh ini diwujudkan dalam bentuk kesepakatan dalam struktur institusional yang dibagi menjadi berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan penyajian yang terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan dari suatu entitas yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Laporan keuangan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dikelola. Dalam laporan keuangan terdapat informasi mengenai entitas meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan juga beban dan yang dirangkum dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berisikan kebijakan akuntansi dan informasi penjas.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur berkenaan tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh organisasi pelaporan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Secara spesifik, tujuan dibuatnya laporan keuangan pemerintah ini adalah untuk menyajikan sebuah informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan sebuah keputusan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas sumber daya yang telah dipercayakan. Secara umum, Pradono dan Basukianto (2015) menyatakan tujuan laporan keuangan pemerintah dibuat untuk

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu organisasi pelaporan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan mengevaluasi keputusan yang berkaitan tentang alokasi sumber daya. Dalam lembaga pemerintahan dituntut untuk menyajikan informasi laporan keuangan yang dinyatakan dalam keuangan dan bukan keuangan.

2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat jika laporan keuangan tersebut memiliki informasi yang dapat diandalkan dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat dikatakan sangat baik apabila mampu menyediakan informasi berupa laporan keuangan yang mudah dipahami, bisa memenuhi kebutuhan untuk pengambilan keputusan, bebas dari salah saji material, tidak menyesatkan pengguna, bisa diandalkan dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya (Ikriyati dan Aprilia, 2019). Pemerintah daerah sudah seharusnya menyajikan laporan keuangan yang berkualitas bagi para pemangku kepentingan. Hal itu juga sejalan dengan laporan keuangan yang menjadi salah satu alat untuk menunjukkan capaian dan pertanggungjawaban kinerja suatu entitas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah yang berkualitas harus memenuhi sifat karakteristik kualitatif yaitu, relevan, andal, mudah dipahami, dan bisa dibandingkan. Semua karakteristik di atas dijadikan syarat yang dibutuhkan untuk membuat laporan

keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Adapun pengertian sifat karakteristik kualitatif tersebut adalah:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang tercantum dalam laporan keuangan dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Informasi digunakan oleh pengguna untuk mengevaluasi kinerja pada masa kini juga masa lalu dan memperkirakan di masa akan datang. Relevan apabila informasi yang dihasilkan dapat dihubungkan dengan pengguna.

2. Andal

Laporan keuangan dikatakan andal apabila penyajian laporan keuangan bebas dari salah saji material, disajikan secara jujur, bebas dari kesalahan, dan benar benar menggambarkan keadaan sesungguhnya pada entitas.

3. Dapat dipahami

Informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan dengan asumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan tentang akuntansi, bisnis, dan ekonomi.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan memiliki manfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada tahun sebelum dan juga dapat dibandingkan dengan badan usaha lain yang sejenis.

Karakteristik tersebut juga dapat dijadikan syarat normatif yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah agar laporan yang dihasilkan berkualitas.

Pemerintah daerah dikatakan mampu untuk mencapai capaian kinerja berupa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pertanggungjawaban sumber daya yang telah diserahkan apabila telah menyajikan informasi keuangan yang terdapat persyaratan kriteria karakteristik kualitatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tullah *et al.* (2018) dalam penelitiannya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disajikan harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 agar memiliki kekuatan hukum dan meningkatkan akuntabilitas serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah harus menyajikan informasi keuangan sesuai dengan kriteria nilai informasi yang telah ditetapkan. Apabila tidak sesuai dengan peraturan, maka akan mengakibatkan kerugian bagi daerah, kelemahan administrasi, dan pemborosan waktu sehingga tidak efektif dan efisien.

2.3 Faktor-Faktor yang Memiliki Pengaruh Pada Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, pemerintah baik pusat maupun daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pelaporan keuangan dapat mempermudah pengguna untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan laporan keuangan karena terdapat keterbatasan kewenangan dan kemampuan dalam mendapatkan informasi (Syarifudin, 2014). Oleh karena itu laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah harus memiliki kualitas yang baik. Terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di antaranya adalah:

2.3.1 *Good Government Governance*

Good government governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan sebuah kepemimpinan yang baik, pelayanan publik secara efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan, dan pemerintah yang bertanggung jawab (Sholohah *et al.*, 2019). Dengan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik pada lembaga pemerintahan maka akan terbentuk sebuah pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan undang-undang (Sholohah *et al.*, 2019). Tata kelola pemerintahan dapat diwujudkan dengan membangun hubungan antar pelaku penting dalam pemerintahan supaya semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut (Tullah *et al.*, 2018). Sangat penting terciptanya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik karena dapat memberikan sebuah *output* yang berkualitas untuk publik.

Penelitian yang dilakukan Maramis *et al.* (2018) menunjukkan *good government governance* memiliki peranan vital dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *good government governance* maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Jika pemerintah daerah menerapkan *good government governance* dengan baik hal ini juga berdampak pada aspirasi politik maupun ekonomi yang akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan *good government governance* di lingkungan perusahaan. Apabila *good government governance* dijalankan dengan baik maka kinerja dari pemerintah juga akan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat (Hutapea dan Widyaningsih, 2019).

2.3.2 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal disusun oleh manajemen dan dilaksanakan oleh anggota organisasi di semua lini, agar dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan menjalankan efisiensi dan efektivitas proses operasional, keandalan pencatatan keuangan, dan kepatuhan terhadap aturan (Idawati dan Eleonora, 2020). Pengendalian intern tidak hanya peristiwa atau keadaan yang terjadi dengan sendirinya, tapi merupakan rangkaian tindakan yang mencakup semua kegiatan di dalam instansi (Idawati dan Eleonora, 2020). Berjalannya sistem pengendalian intern dapat dipastikan dengan memutakhirkan dan mendokumentasikan sistem pengendalian intern yang relevan dengan baik dari awal sampai akhir pelaporan keuangan (Idawati dan Eleonora, 2020). Untuk membantu organisasi agar mencapai tujuannya serta memastikan bahwa kegiatan operasi berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, maka perlu dijalankan sebuah sistem pengendalian intern di dalamnya.

Penelitian Siwambudi *et al.* (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki fungsi sebagai pemberi keyakinan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berperan secara aktif dalam menciptakan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Penelitian Rokhlinasari dan Hidayat (2016) menunjukkan bahwa dengan meningkatnya sistem pengendalian internal yang dijalankan dalam organisasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik. Dengan diterapkannya sistem pengendalian intern maka

kesalahan-kesalahan dan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat berkurang sehingga dapat menghasilkan informasi yang benar dan berkualitas.

2.3.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan penerapan suatu pernyataan fundamental akuntansi yang dituangkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Nugraeni dan Budiantara, 2015). Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah harus menyajikan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang memenuhi prinsip dan disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (Nugraeni dan Budiantara, 2015). Menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan bertumpu pada Standar akuntansi pemerintahan diharapkan laporan keuangan pemerintah yang dipublikasikan dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan diperlukan penerapan SAP agar laporan yang disajikan sesuai prinsip dan dapat diterima secara umum.

Penelitian Ramadhan dan Alpi (2019) menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah yang efektif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Penelitian Udiyanti *et al.* (2014) menunjukkan bahwa dalam SAP terdapat komponen-komponen lengkap yang terdapat pada laporan keuangan yang membuat informasi dapat disajikan secara andal.

Dengan demikian penerapan standar akuntansi pemerintahan yang dijadikan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan.

2.3.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk menentukan kesuksesan suatu entitas untuk mencapai tujuan perusahaan (Syarifudin, 2014). SDM yang mempunyai kompetensi akan melakukan pekerjaan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki maka pekerjaan akan lebih mudah, cepat dan dengan pengalaman yang dimiliki dapat mengurangi kesalahan (Syarifudin, 2014). Pada organisasi publik, SDM dituntut untuk memberi layanan yang memuaskan untuk masyarakat, agar lembaga pemerintah memiliki nama baik yang unggul dan akuntabel (Syarifudin, 2014). Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik SDM perlu memiliki kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Penelitian Yaqin dan Jatmiko (2018) menyatakan kompetensi SDM berperan secara aktif dalam kualitas laporan keuangan yang disajikan. Ini menunjukkan semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki maka semakin baik juga laporan keuangan yang disajikan. Penelitian Pradono dan Basukianto (2015) mengemukakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten sehingga diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik dan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

2.3.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya dipergunakan oleh entitas swasta tetapi juga sektor publik (Nabila *et al.*, 2020). Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan, untuk melanjutkan proses pengembangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, pemerintah berkewajiban untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kewajiban pada era saat ini karena dapat membantu sumber daya manusia mengelola keuangan (Nabila *et al.*, 2020). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan dari manusia dalam mengelola laporan keuangan hingga penyajian laporan keuangan (Nabila *et al.*, 2020).

Penelitian Firdaus *et al.* (2015) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mempercepat proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Pradono dan Basukianto (2015) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan semakin baik dalam pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
1	Yusniyar <i>et al.</i> (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) • <i>Good Governance</i> (GG) • Pengendalian Intern (SPI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (KLKPD) • <i>Good Governance</i> (GG) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 132 responden pada SKPA di Pemerintah Aceh • SPSS • <i>Accountability Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • SAP => GG (didukung) • SPI => GG (didukung) • SAP => KLKPD (didukung) • SPI => KLKPD (didukung) • GG => KLKPD (didukung)
2	Idawati dan Eleonora (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian internal (SPI) • Akuntabilitas Keuangan (AK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 114 responden di Satuan Kerja Perangkat Daerah • Structural Equation Model SmartPLS • Teori: <i>Treadway Commission</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • SPI => KLKPD (didukung) • AK => KLKPD (didukung)
3	Vidyasari F (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas Keuangan (AK) • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 40 pegawai BPKADSPSS versi 25 • Teori: transparansi dan akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • AK => KLKPD (didukung) • SAKD => KLKPD (didukung)

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
4	Putra D (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan Sumber Daya Manusia (KSDM) • Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (PSIA) • Peran Pengawas Internal (PPI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas Keuangan (AK) • Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 40 responden • Purposive sampling SPSS 20 • Teori: <i>Agency Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • KSDM => KLKPD (tidak didukung) • PPI => KLKPD (tidak didukung) • PSIA => KLKPD (didukung) • KSDM => AK (didukung) • PPI => AK (didukung) • KLKPD => AK (didukung)
5	Setiawan dan Gayatri (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi Berbasis Akrua (ABA) • Penerapan Pengendalian Intern (SPI) • Motivasi Kerja (MK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 141 SKPD • purposive sampling SPSS • Teori <i>Agency</i> dan <i>Principal Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • ABA => KLKPD (didukung) • SPI => KLKPD (didukung) • MK => KLKPD (didukung)
6	Muda <i>et al.</i> (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) • Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 120 dari 39 SKPD di Kabupaten Labuhanbatu • SEM dengan bantuan SmartPLS <i>software</i> 2.0 M3 • Teori: <i>Decision Usefulness Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • KSDM => KLKPD (tidak didukung) • PTI => KLKPD (tidak didukung) • KSDM => SAKD (didukung) • PTI => SAKD (didukung)

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
7	Widaryani dan Kiswanto (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) • Penerapan Pengendalian Internal (SPI) • Komitmen (KO) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 83 responden • purposive sampling • purposive sampling Structural Equation Model (SEM) smartPLS • Teori: <i>Goal-setting theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • SAKD => KLKPD (didukung) • SPI => KLKPD (didukung) • KO => KLKPD (tidak didukung)
8	Shoholah <i>et al.</i> (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Good Government Governance</i> (GGG) • Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) • Monitoring (M) • Kualitas Reformasi Pemerintah Daerah (KRPD) • Kompetensi SDM (KSDM) • Sistem Akuntansi keuangan (SAKD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan (KLKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 49 responden • <i>purposive sampling software</i> SPSS V20 • Teori: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 	<ul style="list-style-type: none"> • GGG => KLKPD (tidak didukung) • SAP => KLKPD (tidak didukung) • M => KLKPD (didukung) • KRPD => KLKPD (tidak didukung) • KSDM => KLKPD (tidak didukung) • SAKD => KLKPD (tidak didukung)

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
9	Yuliani dan Agustini (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan SDM (KSDM) • Sistem Akuntansi Keuangan (SAKD) • Penggunaan Teknologi Informasi (PTI) • Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) • PPengendalian intern (SPI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 88 pegawai di SKPD Kabupaten Magelang • SPSS dengan Regresi Linear Berganda • Teori: <i>Agency Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • KSDM => KLKPD (tidak didukung) • SAKD => KLKPD (didukung) • PTI => KLKPD (didukung) • SAP => KLKPD (tidak didukung) • SPI => KLKPD (tidak didukung)
10	Herindraningrum dan Indrawati (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas Keuangan (AK) • Transparansi Keuangan (TK) • Kemampuan SDM (KSDM) • Penggunaan Teknologi Informasi (PTI) • Kualitas Audit (KA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (KLKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Literatur Review • memetakan 28 jurnal terpilih dari tahun 2015 hingga tahun 2020 di database Google Scholar • Systematic Literature Review • Teori: transparansi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • AK => KLKPD (didukung) • TK => KLKPD (didukung) • KSDM => KLKPD (didukung) • PTI => KLKPD (didukung) • KA => KLKPD (didukung) • SAP => KLKPD (didukung) • SA => KLKPD (didukung)

		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Akuntansi Prosedur (SAP) • Standar Akuntansi (SA) 	ISLAM	akuntabilitas	
--	--	---	-------	---------------	--



Berbagai penelitian yang dilakukan terdahulu, terdapat berbagai macam variabel yang ditemukan di antaranya adalah Kompetensi SDM, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, interaksi komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi, audit internal, adopsi teknologi, *Good government governance*, Akuntabilitas, Transparansi, dan monitoring. Mayoritas penelitian terdahulu yang telah disebutkan menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diperoleh melalui kuesioner. Alat uji yang digunakan juga beragam seperti SPSS, *Structural Equation Model* (SEM) dan *systematic Literature Review*. Masing-masing penelitian dalam mendukung variabelnya menggunakan beberapa teori yang ada seperti *Agency Theory* (AT), *Stewardship Theory* (ST), *Resources Based Theory* (RBT) *Goal-setting theory* (GST), *Decision Usefulness Theory* (DUT), *Principal Theory* (PT).

Hasil yang diperoleh pada penelitian terdahulu pun beragam. Secara keseluruhan, penegakan *good government governance* memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Hutapea dan Widyaningsih, 2019; Tullah *et al.*, 2018), sistem pengendalian intern (Yaqin dan Jatmiko, 2018), sistem akuntansi pemerintahan (Wati *et al.*, 2014), keunggulan sumber daya manusia (Pradono dan Basukianto, 2015), dan pemanfaatan teknologi informasi (Firdaus *et al.*, 2015). Akuntabilitas dan transparansi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Herindraningrum dan Yuhertiana, 2021). Pelaksanaan monitoring juga memiliki peran dalam penyajian kualitas laporan keuangan (Sholohah *et al.*, 2019); komitmen organisasi

(Widaryani dan Kiswanto, 2020); motivasi kerja (Setiawan dan Gayatri, 2017). Peran pengawas internal juga memiliki hubungan positif atas kualitas laporan keuangan (Putra, 2018).

2.5 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah merupakan hubungan prinsipal dan agen. Prinsipal memberikan wewenang kepada agen, sebagai pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan prinsipal maka agen menyajikan laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal (Putra, 2018). Untuk memberikan informasi yang andal dan relevan kepada pihak prinsipal, maka agen berusaha untuk memberikan laporan keuangan yang memiliki kualitas baik agar informasi yang didapat oleh pihak prinsipal juga baik dan berkualitas.

2.5.1 Pengaruh *Good Government Governance*

Good government governance didefinisikan sebagai struktur, kebijakan, prosedur, dan pengambilan keputusan pada pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan keyakinan dalam pencapaian tujuan organisasi (Kewo & Tanor, 2020). Pada tata kelola pemerintahan terdapat serangkaian kebijakan, prosedur dan tanggung jawab yang digunakan untuk mengarahkan laju organisasi agar mendapatkan keyakinan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dan kegiatan dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab. *Good government governance* secara konseptual terdapat dua pemahaman, sebagai nilai yang menjunjung kehendak masyarakat dan nilai yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan (Yusniyar *et al.*, 2016).

Hasil penelitian Batubara (2006) menunjukkan bahwa penerapan *Good government governance* berdasar teori desentralisasi, merupakan sebuah tuntutan dari sebuah pembaharuan sistem keuangan. Manfaatnya agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan transparan dan dipertanggungjawabkan pada pelaporan keuangan. Dalam penggunaan dan pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dengan menerapkan prinsip *Good government governance* diharapkan dapat berjalan baik sehingga perlu dukungan dari pemerintah, swasta dan rakyat (Amijaya, 2019). Bagi akuntabilitas laporan keuangan sektor publik *Good government governance* memiliki pengaruh hal ini karena pada tata kelola pemerintah yang baik terdapat struktur, kebijakan, prosedur, pengambilan keputusan dan perilaku yang baik.

Dengan mengacu pada temuan literature, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Good government governance* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai sebuah proses sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari kebijakan dan prosedur untuk dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan organisasi (Kewo dan Tanor, 2020). Pengendalian intern merupakan sebuah langkah untuk mengawasi kinerja serta dapat mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pengendalian internal mempunyai peranan yang penting dalam

mewujudkan tujuan entitas karena di dalamnya terdapat kebijakan dan prosedur untuk mencapai sasaran dan menyediakan informasi keuangan secara andal, serta menjamin kepatuhan hukum yang berlaku. Sistem pengendalian intern juga harus diterapkan dalam lingkungan pemerintah agar mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan berkualitas (Yusniyar *et al.*, 2016).

Pengendalian intern memiliki peran penting guna tercapainya tujuan organisasi baik itu bisnis maupun sektor publik. Dalam penelitian Idawati dan Eleonora (2020) yang menggunakan *Treadway Commission Theory* menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bekasi. Semakin baik pengendalian intern maka semakin baik juga laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian Setiawan dan Gayatri (2017) berdasarkan *agency* dan *principal theory* menunjukkan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh secara positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan pembahasan yang disajikan di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian seperti berikut:

H2: Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5.3 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat didefinisikan sebagai prinsip akuntansi yang ditetapkan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah (Udiyanti *et al.*, 2014). Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan dapat menyeimbangkan perubahan akuntansi sektor publik, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan output berupa laporan keuangan di mana laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja keuangan pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang memiliki kualitas baik. Standar akuntansi pemerintah juga penting untuk terbentuknya transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan di sektor pemerintahan (Sholohah *et al.*, 2019). Selain itu SAP juga digunakan sebagai alat untuk mempermudah pemahaman dari berbagai satuan kerja pemerintahan dan agar tidak ada perbedaan antara laporan keuangan pemerintah itu sendiri. Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 SAP sebagai standar yang menjamin laporan keuangan disajikan memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang disajikan harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan berpedoman pada SAP. Pada penelitian Yaqin dan Jatmiko (2018) dengan *stewardship theory* menyatakan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif pada kualitas laporan keuangan. Dengan menerapkan SAP yang baik maka laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin baik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) dengan *agency*

theory menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan di pemerintah Kabupaten Magelang. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Magelang belum ditetapkan secara maksimal sehingga berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau sebuah sistem untuk melaksanakan pekerjaan dan kewenangan dalam mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Nabila *et al.*, 2020). SDM harus memiliki pemahaman mengenai akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan SDM sangat dibutuhkan supaya informasi keuangan yang tersaji dapat sesuai dengan karakteristik kualitatif (Wati *et al.*, 2014). Kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja suatu entitas. Setiap individu harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan dan nantinya akan dipertanggungjawabkan. Sumber daya manusia yang memiliki karakteristik tersebut maka tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas kinerja. SDM yang tidak memiliki kompetensi akan menghambat

dalam penyelesaian pekerjaan secara efektif dan efisien selain itu juga akan ada pemborosan waktu serta tenaga (Wati et al., 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Pradono dan Basukianto (2015) berdasarkan *contingency theory* menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh secara positif terwujudnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Hal ini berartikan bahwa semakin baik keunggulan sumber daya manusia maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan penelitian Putra (2018) dengan menggunakan *agency theory* menunjukkan kemampuan aparatur tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kota Palembang. Hal ini dikarenakan, tidak adanya kesiapan pemerintah daerah dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dan belum ada SDM yang memadai.

Berdasarkan uraian yang disajikan di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sebuah serangkaian proses, pengelolaan, dan penyebaran data dengan menggunakan komputer dengan telekomunikasi (Yuliani dan Agustini, 2016). Dengan menggunakan teknologi informasi akan mempermudah dalam proses pengolahan data dan penyajian laporan keuangan

pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan menyatakan bahwa untuk terlaksananya proses pembangunan yang sejalan dengan *good government governance*, pemerintah daerah diperlukan untuk pengembangan kemajuan teknologi dalam peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sangatlah memerlukan pengoptimalan dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat meningkatkan kinerja pegawai serta mempermudah dalam penyampaian informasi antar unit kerja. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, penggunaan teknologi informasi merupakan sebuah keharusan untuk membantu pengelolaan agar efektif dan efisien (Putra, 2018).

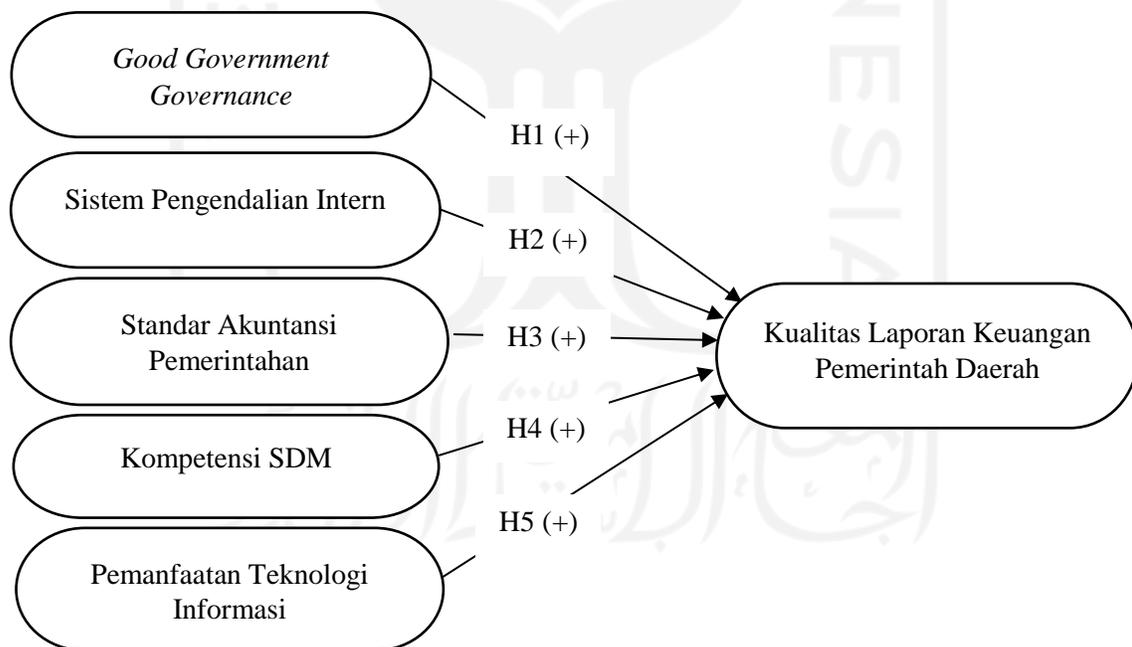
Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus *et al.* (2015) menggunakan *principal theory* menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan. Hal ini berarti semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin cepat proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Sedangkan penelitian Muda *et al.* (2017) berdasarkan *decision usefulness theory* menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini disebabkan karena tidak diterapkannya teknologi informasi sehingga pekerjaan tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga laporan yang dihasilkan tidak berkualitas.

Berdasarkan pembahasan yang disajikan, maka dihasilkan rumusan hipotesis penelitian seperti berikut:

H5: Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.6 Kerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan pada bagian sebelumnya, untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, maka dibuatlah ilustrasi seperti Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari survei dengan teknik kuesioner. Kuesioner akan ditujukan kepada staf karyawan yang melakukan pengelolaan keuangan yang terdiri dari bendahara dan staff tata usaha keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen secara langsung.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sebuah bentuk penalaran yang terdiri dari objek/subjek di mana objek/subjek tersebut memenuhi syarat karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2012). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari dinas, badan, kantor, dan sekretaris daerah. Sedangkan sampel merupakan bagian atau sub kelompok dari populasi untuk mewakili populasi yang dipilih (Yusuf, 2014). Sampel pada penelitian ini adalah staff karyawan dinas yang bertanggung jawab atas keuangan yang terdiri bendahara dan staff tata usaha keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen. Metode dalam pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan *non-probability sampling* dengan

teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik dengan menentukan sampel atas pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).

Menentukan jumlah besaran minimal sampel yang dibutuhkan maka jumlahnya dapat disesuaikan dengan indikator pertanyaan yang digunakan pada kuesioner penelitian, dengan $n \times 5$ penelitian variabel (indikator) (Hair *et al.*, 2019). Penelitian ini terdiri dari enam variabel yang terdiri dari lima variabel independen dan satu variabel dependen yang mana terdapat 20 indikator pertanyaan dari enam variabel penelitian. Maka jumlah sampel minimal yang diperlukan untuk mewakili penelitian ini berjumlah $20 \times 5 = 100$. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 120 sampel agar data yang didapatkan lebih akurat.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan data primer. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini berupa pendistribusian kuesioner dengan pertanyaan terstruktur. Kuesioner adalah sebuah alat yang menggunakan metode survei yang ditujukan kepada responden untuk memperoleh pendapat responden guna memenuhi data primer pada penelitian (Pujihastuti, 2010). Dengan menggunakan kuesioner informasi yang diperoleh akan lebih banyak, dapat mempersingkat waktu dan biaya yang lebih rendah (Yusuf, 2014). pada penelitian ini kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner tertutup, di mana alternatif jawaban sudah ditentukan oleh peneliti dan responden hanya dapat memilih alternatif yang disediakan. Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner akan digunakan untuk

mengetahui beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen.

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan atribut dari seseorang, objek atau aktivitas yang terdapat suatu variasi tertentu yang telah ditetapkan peneliti guna dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu, variabel dependen merupakan variabel yang menjadi akibat dan hasilnya dipengaruhi variabel independen dan variabel independen merupakan variabel bebas yang menjelaskan dan menentukan variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, untuk variabel independen dalam penelitian ini yaitu, *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Untuk menilai keenam variabel tersebut, peneliti menggunakan skala *likert*, di mana responden diminta untuk mengisi kolom dengan memberikan tanda pada pilihan 1-6. Pengisian kolom pada kuesioner diisikan langsung oleh responden untuk memberikan pernyataan yang telah peneliti ajukan pada angket tersebut.

Tingkat pernyataan atas persetujuan responden yang telah diungkapkan pada pertanyaan dilihat dari nilai 1-6. Nilai 1 berartikan bahwa responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju (STS)” atas pernyataan yang telah diberikan. Nilai tersebut menjelaskan tingkat persetujuan responden atas pernyataan pada kuesioner bernilai rendah. Untuk nilai 6 berartikan bahwa responden menyatakan “Sangat Setuju (SS)” atas pernyataan yang

telah diberikan. Nilai tersebut menjelaskan tingkat persetujuan responden atas pernyataan pada kuesioner bernilai tinggi.

3.4.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD)

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan sehingga dapat terpenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang perlu ada dalam laporan keuangan sebagai syarat normatif adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Informasi pada laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menunjukkan bahwa pemerintah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan (Yusniyar *et al.*, 2016). Penelitian (Vidyasari, 2021) dengan penyajian yang baik pada laporan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, tercapainya laporan keuangan yang memiliki kualitas dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan maka pemerintah daerah layak dianggap sebagai pemerintah dengan tata kelola yang baik pula. Penelitian ini mengungkapkan bahwa laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat akuntabilitas pemerintah kepada pemangku kepentingan sehingga laporan harus disajikan dengan tepat agar memiliki kualitas baik sesuai karakteristik kualitatif laporan keuangan (Idawati dan Eleonora, 2020).

Maka dari itu, diajukan empat item pertanyaan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen yang dikembangkan oleh Yusniyar *et al.* (2016), adapun item pertanyaan yang dimaksud terdapat pada Tabel 3.1.

Table 3.1 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator	Sumber
1	Laporan keuangan disajikan secara lengkap dan bebas salah saji material	Vidyasari (2021)
2	Informasi yang tersedia pada laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan	
3	Informasi keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya	
4	Informasi keuangan dalam mudah dipahami oleh pemangku kepentingan	

3.4.2 *Good Government Governance* (GGG)

Good government governance (tata kelola pemerintahan yang baik) didefinisikan sebagai struktur, kebijakan, prosedur, proses penentuan keputusan dan perilaku pemerintahan untuk memberikan pengarahannya yang berupa keyakinan untuk mencapai tujuan bagi pemangku kepentingan (Kewo dan Tanor, 2020). Jika *Good government governance* telah terwujud dalam entitas pemerintahan maka hal itu dapat membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi berkualitas sesuai dengan standar (Sholohah *et al.*, 2019).

Good government governance memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disajikan (Tullah *et al.*, 2018). Hal itu

menunjukkan bahwa pemerintah harus menerapkan prinsip *good government governance* pada lingkungan kerja seperti integritas mengenai budaya kerja, keterbukaan, evaluasi menggunakan indikator yang telah ditentukan, intervensi kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, manajemen risiko dan akuntabilitas.

Berdasarkan diskusi di atas, diajukan empat item pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikembangkan oleh Kewo dan Tanor (2020); Tullah *et al.* (2018); serta Maramis *et al.* (2018). Adapun item pertanyaan yang dimaksud terdapat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Indikator *Good Government Governance*

No	Indikator	Sumber
1	Organisasi menjalankan pemerintahan secara solid dan bertanggungjawab	Kewo dan Tanor (2020); Tullah <i>et al.</i> (2018); Maramis <i>et al.</i> (2018)
2	Memastikan keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan	
3	Menunjukkan integritas, kepatuhan hukum, serta komitmen yang kuat pada nilai-nilai etika	
4	Efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan kesesuaian antara rencana dengan pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki	

3.4.3 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai rancangan yang dibuat oleh manajemen yang dijalankan oleh anggota pada semua tingkatan organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pencatatan dan kepatuhan (Idawati dan Eleonora, 2020).

Pengendalian intern terdiri atas rencana dan metode pengukuran untuk mengoordinasikan antara tujuan, kekayaan, keakuratan pencatatan, dan mendorong pematuhan kebijakan manajemen (Amijaya, 2019). Pengendalian intern dapat dipastikan beroperasi dengan memastikan pengendalian internal telah dimutakhirkan dan didokumentasikan (Idawati & Eleonora, 2020).

Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan karena sistem pengendalian sudah baik akan tetapi penerapan yang dilakukan masih belum efektif dan efisien (Gustina, 2021). Pengendalian manajemen harus dijalankan secara efektif dan efisien karena dengan adanya sistem pengendalian intern, personel akan diarahkan dan diawasi sehingga akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Berdasarkan diskusi di atas, diajukan lima item pertanyaan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikembangkan oleh Putra (2018); Yusniyar *et al.* (2016); serta Amijaya (2019). Adapun item pertanyaan yang dimaksud terdapat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal

No	Indikator	Sumber
1	Lingkungan pengendalian yang terdiri atas kebijakan, tindakan dan prosedur	Putra (2018); Yusniyar <i>et al.</i> (2016); Amijaya (2019)
2	Penilaian risiko untuk analisis risiko dan perencanaan pengaturan risiko	
3	Aktivitas pengendalian pada entitas untuk melakukan tindakan melalui kebijakan dan prosedur	

4	Informasi yang relevan dan berkualitas serta komunikasi kepada petugas secara tepat waktu	
5	Pemantauan kegiatan evaluasi yang sifatnya berkelanjutan, terpisah atau campuran	

3.4.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai dasar fundamental akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Nugraeni dan Budiantara, 2015). Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dikatakan sebagai syarat yang harus dipenuhi karena di dalamnya terdapat hukum yang mengatur agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Oleh karena itu SAP dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik itu pusat maupun daerah (Nugraeni dan Budiantara, 2015). Penerapan SAP yang baik akan memengaruhi kualitas informasi yang didapat pada laporan keuangan karena laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Udiyanti *et al.*, 2014). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Juwita, 2013). Penerapan SAP dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan harus dilakukan dengan baik agar terwujudnya kualitas laporan keuangan yang baik.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka diajukan empat item pertanyaan yang dikembangkan oleh Juwita (2013); serta Nugraeni dan Budiantara (2015). Adapun item pertanyaan yang dimaksud terdapat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Indikator	Sumber
1	Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan	Juwita (2013); serta Nugraeni dan Budiantara (2015)
2	Konsep dalam penyajian laporan keuangan	
3	Konsep koreksi kesalahan atas laporan keuangan	
4	Konsep pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah	

3.4.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)

Kompetensi didefinisikan sebagai keselarasan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap individu yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam melakukan pekerjaan yang dapat diukur dengan standar dan dapat dilatih serta dikembangkan (Yaqin dan Jatmiko, 2018). Kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam menyusun laporan keuangan agar tercapainya laporan keuangan yang memiliki kualitas baik sehingga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (Udiyanti *et al.*, 2014). Dalam sektor publik kemampuan dalam melayani masyarakat menjadi hal penting demi reputasi kinerja yang unggul di mata masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila *et al.* (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan memiliki kompetensi SDM yang baik maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan adalah *output* yang dikeluarkan oleh SDM, untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang berkompeten.

Berdasarkan diskusi di atas, diajukan tiga item pertanyaan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang dikembangkan oleh Nabila *et al.* (2020); Yaqin dan Jatmiko (2018); serta Syarifudin (2014). Adapun item pertanyaan yang dimaksud terdapat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Sumber
1	Pengetahuan yang dimiliki oleh SDM	Nabila <i>et al.</i> (2020); Yaqin dan Jatmiko (2018); Syarifudin (2014)
2	Keterampilan yang dimiliki oleh SDM	
3	Sikap dan perilaku SDM	

3.4.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

Pemanfaatan teknologi informasi didefinisikan sebagai sebuah proses, pengelolaan dan pendistribusian data yang didapat dari penggabungan komputer dengan telekomunikasi (Yuliani & Agustini, 2016). Penggunaan teknologi sudah menjadi kewajiban tidak terkecuali pada organisasi sektor publik. Dengan adanya teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya. Dengan memaksimalkan penggunaan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan (Nabila *et al.*, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Muda *et al.* (2017) menyatakan bahwa Penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan dan positif dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi akan membantu proses pengelolaan data sehingga akan lebih cepat dan meminimalisir

kesalahan yang dapat dibuat. Selain itu laporan daerah yang dihasilkan juga akan lebih andal, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan diskusi di atas, diajukan lima item pertanyaan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dikembangkan oleh Firdaus *et al.* (2015); Nabila *et al.* (2020); serta Yuliani dan Agustini (2016). Adapun item pertanyaan yang dimaksud pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Indikator	Sumber
1	Jumlah komputer yang memadai dan dapat digunakan	Firdaus <i>et al.</i> (2015); Nabila <i>et al.</i> (2020); Yuliani dan Agustini (2016)
2	Pemanfaatan jaringan internet	

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1 Alat Analisis Data

Data pada penelitian ini diperoleh dari teknik kuesioner yang ditujukan kepada pegawai dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang bendahara dan staff tata usaha keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen. Analisis data menggunakan metode deskriptif. Model penelitian kuantitatif ini dianalisis menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)* dengan bantuan *SmartPLS*.

3.5.2 Metode Pengukuran

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah alat untuk mengukur kesesuaian apakah kuesioner sudah berjalan sesuai dengan fungsinya (Juwita, 2013). Pengumpulan data diperoleh dengan mengorelasikan skor jawaban dari responden dengan total skor masing masing variabel. Terdapat enam variabel yang akan diuji pada penelitian ini yaitu *good government governance*, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Alat ukur dapat diandalkan apabila alat ukur yang digunakan memberikan hasil yang konsisten atau relatif sama (Juwita, 2013). Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban yang diberikan oleh responden itu konsisten dari waktu ke waktu (Imam; Ghozali, 2018). Untuk mengukur konsistensi menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Kuesioner dikatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha* $\geq 0,70$. Hasil tersebut menunjukkan pernyataan dapat dikatakan reliabel (Juwita, 2013).

3.5.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah nilai untuk menentukan besar kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (Juwita, 2013). Nilai koefisien determinasi ini adalah 0 – 1. Apabila hasil dari $R^2 = 0$, hal ini menunjukkan

bahwa tidak ada pengaruh sedikitpun yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, namun jika $R^2 = 1$ maka variabel independen sangat berpengaruh pada variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 menunjukkan adanya kapabilitas variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen juga tinggi (Ghozali, 2018).

3.5.2.4 Uji T Hipotesis

Uji T atau disebut uji parsial merupakan alat uji untuk menguji signifikansi hubungan variabel independen pada penelitian baik terpisah dalam mengemukakan variabel dependen ataupun secara parsial (Vidyasari, 2021). Uji T ini digunakan untuk menguji *good government governance*, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hipotesis yang digunakan uji ini yaitu:

H_0 : Variabel independen (X) tidak terdukung terhadap variabel dependen (Y)

H_1 : Variabel independen (X) terdukung terhadap variabel dependen (Y)

Semakin kecil *P-Value* (probabilitas) maka semakin besar ketidakcocokan statistik data dengan hipotesis nol. Namun apabila *P-Value* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima dan hipotesis ditolak. Jika *P-Value* kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis dapat diterima (Lewis *et al.*, 2019).

3.5.2.5 Uji Goodness of Fit (GoF)

Uji *Goodness of Fit* (GoF) menunjukkan tingkat baiknya model yang digunakan dan ditentukan secara matematis mereproduksi matriks kovarians yang telah diobservasi di antara indikator, kesamaan matriks kovarians yang diamati dan diperkirakan (*Hair et al.*, 2019). Nilai *Goodness of Fit* (GoF) antara 0 – 1, dengan rekomendasi nilai *communality* yaitu sebesar 5% dan nilai dari R^2 (koefisien determinasi) dengan nilai interpretasi 10% adalah GoF kecil, 25% adalah GoF sedang dan 30% GoF besar (*Ghozali dan Latan*, 2014).



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Analisis data pada penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memberikan gambaran atas penelitian yang diperoleh dari responden terhadap variabel penelitian (Sugiyono, 2012). Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan *good government governance*, sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software* SmartPLS 3.0. Kuesioner ini disebarkan kepada Satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kebumen sebanyak 120 buah. Dari kuesioner yang sudah didistribusikan didapatkan 115 kuesioner kembali, namun hanya 110 kuesioner yang terisi dan dapat digunakan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan surat pengantar penelitian yang diperoleh dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII. Surat pengantar tersebut yang dipergunakan untuk mendistribusikan kuesioner oleh peneliti. Pendistribusian kuesioner yang dilakukan peneliti yaitu pada tanggal 5 Januari 2022 – 24 Januari 2022. Rangkuman pendistribusian dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Pendistribusian kuesioner oleh peneliti	120	100%
Kuesioner yang kembali ke peneliti	115	95,83%
Kuesioner yang tidak kembali ke peneliti	5	4,17%
Kuesioner yang dapat diuji oleh peneliti	110	91,67%
Kuesioner yang tidak dapat diuji oleh peneliti	5	4,17%

Sumber: data primer, diolah 2022

Tabel 4.1 menunjukkan *level* respon dari kuesioner yang didistribusikan oleh peneliti dihasilkan kuesioner yang kembali ke peneliti yaitu 115 buah atau 95,83% dan hasil pendistribusian kuesioner yang dapat digunakan adalah 110 buah 91,67%.

Tabel 4.2 Daftar Distribusi Kuesioner

NO	Satuan Kerja	Jumlah didistribusikan	Jumlah kembali	Jumlah yang dapat diolah
1	Sekretariat Daerah	12	10	10
2	Inspektorat	15	15	13
3	Dinas Pendidikan	10	10	10
4	Dinas Tenaga Kerja	7	7	6
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12	10	10
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	11	11	10
7	Dinas Perhubungan	10	10	10
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	10	10
9	Dinas Perikanan dan Kelautan	7	7	7
10	BAP3DA	12	11	10
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	14	14

Sumber: data primer, diolah 2022

4.1.2. Deskripsi Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari pendistribusian kuesioner, dijelaskan bahwa karakteristik responden dapat dilihat melalui tabel di bawah. Tabel di bawah dapat digunakan untuk mengetahui karakter umum pegawai pemerintah daerah yang bekerja di SKPD Kabupaten Kebumen. Daftar gambaran umum responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Karakteristik Responden

Data	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	53	48,2%
	Perempuan	57	51,8%
Umur	<25 tahun	6	5,5%
	25 tahun – 35 tahun	36	32,7%
	36 tahun – 45 tahun	42	38,2%
	46 tahun – 55 tahun	20	18,2%
	>55 tahun	6	5,5%
Pendidikan	D3	14	12,7%
	S1	82	74,5%
	S2	4	3,6%
	S3	0	0%
	Lainnya	10	9,1%
Jurusan	Akuntansi	32	29,1%
	Manajemen	33	30,0%
	Hukum	4	3,6%
	Ilmu Politik	2	1,8%
	Administrasi Publik	7	6,4%
	Lainnya	32	29,1%
Lama Bekerja	<1 tahun	4	3,6%
	1 tahun – 5 tahun	26	23,6%
	6 tahun – 10 tahun	37	33,6%
	>10 tahun	43	39,1%

Sumber: data primer, diolah 2022

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat gambaran mengenai jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jurusan dan lama bekerja responden. Dilihat dari jenis kelamin responden perempuan lebih banyak dari laki-laki yaitu perempuan 57 orang (51,8%). Dari umur lebih

banyak yang berusia 36 tahun – 45 tahun yaitu sebanyak 42 orang (38,2%). Untuk tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan S1 yaitu sebanyak 82 orang (74,5%) dengan jurusan paling banyak ditempuh yaitu Manajemen sebanyak 33 orang (30%).

Dari sisi lama bekerja, sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 43 orang (39,1%). Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah berpengalaman di bidangnya dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen karena sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Dengan demikian responden telah mengetahui dengan baik untuk kondisi dan lingkungan pada organisasinya.

4.2. Uji Kualitas Data

4.2.1. Model Partial Least Square (PLS)

pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *software* SmartPLS 3.2.9. PLS terdiri atas *outer model* atau model pengukuran dan *inner model* atau model struktural. *Inner model* menitikberatkan pada struktur variabel laten, yang mana variabel laten terdapat hubungan sebab-akibat sedangkan *outer model* mendirikan hubungan di antara item indikator dengan variabel laten yang dimiliki (Cahyaningrum *et al.*, 2015). berikut ini adalah skema model program PLS yang diujikan.

4.2.2. Uji Validitas

4.2.2.1 Convergent Validity

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana validitas data penyebaran kuesioner yang telah dilakukan. Instrumen dapat disimpulkan benar apabila instrumen tersebut dapat menilai yang seharusnya dinilai (Ghozali dan Latan, 2014). Untuk menguji *convergent validity* digunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. *discriminant validity* juga dapat diketahui dengan melihat nilai dari *Average Variance Extracted* (AVE). Uji *discriminant validity* memiliki hubungan dengan prinsip, dengan pengukur konstruk yang berbeda tidak mempunyai korelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2014). Untuk indikator-indikator dari nilai AVE harus memiliki nilai $> 0,5$ agar dapat dikatakan sebagai model yang baik (Ghozali dan Latan, 2014). Suatu indikator dikatakan valid apabila AVE lebih besar dari pada 0.5 dan mempunyai *loading factor* lebih dari 0.7. Akan tetapi untuk penelitian di tahap awal dari skala pengukuran nilai *loading factor* 0.5 sampai dengan 0.6 dianggap sudah cukup valid (Ghozali dan Latan, 2014). Berikut ini merupakan nilai *outer loading* dan AVE dari masing-masing indikator pada variabel penelitian:

Tabel 4.4 *Outer Loading* dan AVE

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Y1	0.891	0.770
	Y2	0.915	
	Y3	0.871	
	Y4	0.913	
	Y5	0.918	
	Y6	0.695	
	Y7	0.873	
	Y8	0.901	
	Y9	0.876	

	Y10	0.879	
	Y11	0.895	
<i>Good Government Governance (X1)</i>	GG1	0.767	0.660
	GG2	0.796	
	GG3	0.843	
	GG4	0.814	
	GG5	0.720	
	GG6	0.782	
	GG7	0.842	
	GG8	0.854	
	GG9	0.825	
	GG10	0.872	
Sistem Pengendalian Internal (X2)	SPI1	0.732	0.639
	SPI2	0.780	
	SPI3	0.807	
	SPI4	0.813	
	SPI5	0.850	
	SPI6	0.871	
	SPI7	0.765	
	SPI8	0.784	
	SPI9	0.810	
	SPI10	0.790	
	SPI11	0.760	
	SPI12	0.806	
	SPI13	0.807	
	SPI14	0.807	
Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)	SAP1	0.858	0.738
	SAP2	0.908	
	SAP3	0.856	
	SAP4	0.878	
	SAP5	0.879	
	SAP6	0.909	
	SAP7	0.798	
	SAP8	0.807	
	SAP9	0.858	
	SAP10	0.822	

	SAP11	0.849	
	SAP12	0.877	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	SDM1	0.794	0.670
	SDM2	0.843	
	SDM3	0.806	
	SDM4	0.840	
	SDM5	0.837	
	SDM6	0.879	
	SDM7	0.821	
	SDM8	0.747	
	SDM9	0.795	
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X5)	PTI1	0.878	0.732
	PTI2	0.886	
	PTI3	0.874	
	PTI4	0.871	
	PTI5	0.782	
	PTI6	0.841	
	PTI7	0.854	

Sumber: data primer, diolah 2022

Berdasar tampilan data pada Tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa masing-masing variabel penelitian hampir semua mempunyai nilai *outer loading* $> 0,7$. Namun, masih ada satu indikator yang mempunyai nilai *outer loading* $< 0,7$ yaitu Y6. Seperti penjelasan di atas, nilai *outer loading* 0,5 sampai dengan 0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat *convergent validity*. Sehingga data di atas menunjukkan tidak adanya indikator variabel yang nilai *outer loading*-nya $< 0,5$. Hal ini menunjukkan semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, *good government governance*, sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai AVE > 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki *discriminant validity* yang baik atau indikator masing masing variabel valid.

4.2.2.2 *Discriminant Validity*

Pada *discriminant validity* dijabarkan hasil dari uji *discriminant validity*. Uji *discriminant validity* ini memanfaatkan nilai dari *cross loading* dalam pengukurannya. Suatu indikator dikatakan memenuhi *discriminant validity* jika nilai *cross loading* > 0,5 sehingga variabel tersebut menjadi pembanding yang bagus untuk sebuah model. Berikut ini adalah nilai *cross loading* masing-masing indikator:

Tabel 4.5 *Cross Loading*

Indikator	Variabel					
	Kualitas Laporan Keuangan	<i>Good Government Governance</i>	Sistem Pengendalian Internal	Standar Akuntansi Pemerintahan	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Pemanfaatan Teknologi Informasi
Y1	0.891					
Y2	0.915					
Y3	0.871					
Y4	0.913					
Y5	0.918					
Y6	0.695					
Y7	0.873					
Y8	0.901					
Y9	0.876					

Y10	0.879				
Y11	0.895				
GG1		0.767			
GG2		0.796			
GG3		0.843			
GG4		0.814			
GG5		0.720			
GG6		0.782			
GG7		0.842			
GG8		0.854			
GG9		0.825			
GG10		0.872			
SPI1			0.732		
SPI2			0.780		
SPI3			0.807		
SPI4			0.813		
SPI5			0.850		
SPI6			0.871		
SPI7			0.765		
SPI8			0.784		
SPI9			0.810		
SPI10			0.790		
SPI11			0.760		
SPI12			0.806		
SPI13			0.807		
SPI14			0.807		
SAP1				0.858	
SAP2				0.908	
SAP3				0.856	
SAP4				0.878	
SAP5				0.879	
SAP6				0.909	
SAP7				0.798	
SAP8				0.807	
SAP9				0.858	
SAP10				0.822	

SAP11				0.849		
SAP12				0.877		
SDM1					0.794	
SDM2					0.843	
SDM3					0.806	
SDM4					0.840	
SDM5					0.837	
SDM6					0.879	
SDM7					0.821	
SDM8					0.747	
SDM9					0.795	
PTI1						0.878
PTI2						0.886
PTI3						0.874
PTI4						0.871
PTI5						0.782
PTI6						0.841
PTI7						0.854

Sumber: data primer, diolah 2022

Berdasarkan tampilan data pada Tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator penelitian ini mempunyai nilai *cross loading* yang paling tinggi pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Selain itu semua nilai pada *cross loading* > 0,5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki *discriminant validity* baik dalam penyusunan variabelnya.

4.2.3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel penelitian. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban dari kuesioner tersebut stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan

dengan menentukan nilai *composite reliability*, jika nilai *composite reliability* > 0,8 maka memiliki reliabilitas besar atau bisa disebut reliabel dan untuk nilai > 0,6 dapat dikatakan cukup *reliabel* (Ghozali, 2018). Untuk uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Jika *composite reliability* memiliki nilai lebih dari 0,7 dan *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 maka dikatakan reliabel (Ghozali dan Latan, 2014). Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas dengan *composite reliability*:

Tabel 4.6 *Composite Reliability dan Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.942	0.973
Good Government Governance	0.939	0.951
Sistem Pengendalian Internal	0.970	0.961
Standar Akuntansi Pemerintahan	0.939	0.971
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.957	0.948
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.968	0.950

Sumber: data primer, diolah 2022

Dari sajian data pada Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa seluruh variabel laten memiliki nilai *composite reliability* > 0,7. Hasil ini menandakan bahwa masing-masing

variabel sudah memenuhi *composite reliability* sehingga dapat disimpulkan keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas tinggi atau dapat dikatakan reliabel untuk seluruh variabel pada penelitian ini. Sedangkan diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel penelitian > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai dari *cronbach's alpha*, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan seluruh variabel sesuai dan layak untuk analisis data selanjutnya.

4.2.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 semakin dekat dengan satu, hal itu menandakan variabel independen dapat menerangkan variabel dependen tidak terbatas (Ghozali, 2013). Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut:

Tabel 4.7 *R-Square*

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.746	0.734

Sumber: data primer, diolah 2022

Pada data di Tabel 4.7, nilai R^2 untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 0,746. Perolehan nilai R^2 tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, *good government governance*, sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi memberikan nilai 0,746. Ini menunjukkan

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 74,6%. Sedangkan 25,4% dijelaskan oleh variabel yang tidak masuk dalam penelitian.

4.2.5. Uji *Goodness of Fit* (GoF)

Uji *Goodness of Fit* (GoF) ini dinilai dari akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) dan nilai *Adjusted R-Square*. Berikut ini tabel 4.10 yang menunjukkan nilai dari AVE dan *Adjusted R-Square*.

Tabel 4.8 *Goodness of Fit*

Variabel	<i>R Square Adjusted</i>	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,734	0,77

Sumber: data primer, diolah 2022

Dengan perhitungan *Goodness of Fit* sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 GoF &= \sqrt{AVE \times R^2} \\
 &= \sqrt{0,77 \times 0,734} \\
 &= 0,752
 \end{aligned}$$

Pada hasil pengukuran Tabel 4.8 di atas, diperoleh nilai GoF sebesar 0,752. Dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini mempunyai *Goodness of Fit* yang tinggi. Semakin tinggi nilai GoF, maka model penelitian semakin sesuai atau cocok dengan penelitian yang dimiliki dan pengujian hipotesis sudah dapat dilakukan.

4.2.6. Uji Hipotesis

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan sebelumnya, hasil dari pengolahan tersebut dapat digunakan untuk memberikan jawaban hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai dari *T-Statistics* dan nilai *P-Values*. Hipotesis penelitian dapat diterima apabila nilai dari *P-Value* < 0,05 (Lewis *et al.*, 2019). Berikut adalah hasil uji hipotesis dalam penelitian ini melalui *inner model*:

Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Hasil
GGG -> KLKPD	0.446	3.332	0.001	Terdukung
SPI -> KLKPD	0.123	0.770	0.442	Tidak Terdukung
SAP -> KLKPD	-0.012	0.063	0.950	Tidak Terdukung
KSDM -> KLKPD	-0.250	1.606	0.109	Tidak Terdukung
PTI -> KLKPD	0.594	4.262	0.000	Terdukung

Sumber: data primer, diolah 2022

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua hipotesis yang memiliki nilai *P-Value* < 0,05 yaitu *good government governance* dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu menunjukkan kedua hipotesis diterima dan hipotesis lain ditolak seperti sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia karena memiliki *P-Value* > 0,05.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Penelitian ini mendapatkan hasil berupa *good government governance* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Hal ini ditunjukkan oleh *good government governance* yang dihubungkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen menunjukkan nilai dari *original sample* dan *P-Value* sebesar 0,446 dan 0,001. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama didukung karena *original sample* bernilai 0,44 yang menunjukkan bernilai positif dan *P-Value* bernilai 0,001 di mana *P-Value* kurang dari 0,05.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Yusniyar *et al.* (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *good government governance* sebagai prinsip yang menjalankan tata kelola pemerintah yang baik sehingga dapat menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjutan pada penelitian Sholohah *et al.* (2019) menyatakan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai aturan perlu adanya *good government governance* yang telah tercapai dalam lingkup organisasi pemerintah.

Kaitannya dengan penelitian ini tentu akan sejalan ketika tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjalankan asas demokrasi agar dapat menyelenggarakan kehidupan masyarakat dengan bercermin pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam kondisi ini semakin baik penerapan *good government governance* maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik.

4.3.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Di dalam penelitian ini pengaruh sistem pengendalian internal yang dihubungkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen menunjukkan nilai pada *original sample* dan *P-Value* adalah sebesar 0,123 dan 0,442. Hal ini menandakan bahwa adanya hubungan positif antara variabel sistem pengendalian internal dengan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen akan tetapi tidak signifikan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_0) diterima dan (H_2) ditolak. *Original sample* bernilai 0,123 menunjukkan bahwa variabel berpengaruh secara positif, akan tetapi dikarenakan nilai dari *P-Value* adalah 0,442 yang lebih besar dari 0,05 maka variabel sistem pengendalian internal dianggap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri pada No. 59 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan cara yang disusun untuk memperoleh kepercayaan yang cukup dengan sebuah pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tergambar dan keterandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas dalam menjalankan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern pada pemerintah daerah sendiri diatur pada PP No. 66

Tahun 2008 yaitu, sistem pengendalian internal merupakan sebuah proses integral pada tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara berulang oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan kepercayaan atas tercapainya tujuan organisasi.

Menurut Yusniyar *et al.* (2016) sebuah sistem memiliki kualitas, rancangan, pembangunan dan dapat bekerja dengan baik jika bagian yang terhubung dengan sistem berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab. Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk merancang, menjalankan dan menjaga sistem pengendalian internal dengan baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan karena kualitas laporan keuangan tidak hanya dinilai dengan keselarasan standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya sistem pengendalian internal dapat meminimalkan risiko dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan khususnya pada peningkatan kualitas laporan keuangan (Syarifudin, 2014).

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) dengan menunjukkan pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam menjalankan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada pemerintah kabupaten kebumen masih belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat kelemahan pada bagian keuangan yang belum menyelenggarakan prosedur yang baik. Selain itu transaksi dapat dilakukan begitu saja tanpa mementingkan otoritas

dari pihak yang berwenang. Alasan tersebut didasari dengan lemahnya kegiatan pengendalian serta informasi dan komunikasi pada organisasi pemerintah di Kabupaten Kebumen.

4.3.3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Pada penelitian ini didapatkan hasil berupa standar akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Hal ini ditunjukkan pada standar akuntansi pemerintahan yang dihubungkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan nilai *original sample* dan *P-Value* sebesar -0,012 dan 0,950. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis (H_0) diterima dan (H_3) ditolak. *Original sample* yang bernilai -0,012 menandakan bernilai negatif dan *P-Value* sebesar 0,950 yang berarti *P-Value* lebih besar dari pada 0,05 sehingga variabel standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa anggaran sebagai pedoman untuk tindakan yang akan dijalankan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun berdasarkan klasifikasi secara sistematis untuk suatu periode. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman pada penyajian laporan keuangan, pemerintah memiliki kewajiban untuk

menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Di dalam standar akuntansi pemerintahan terdapat aturan lengkap yang harus tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah, apabila standar akuntansi pemerintahan diterapkan dengan baik maka laporan yang disajikan pemerintah daerah akan memiliki kualitas sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang akurat.

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung hasil dari Herindraningrum dan Yuhertiana (2021) serta Udiyanti *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa penerapan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan Standar akuntansi pemerintahan di Kabupaten Kebumen masih belum maksimal, sehingga dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perlu diadakannya sosialisasi mengenai standar akuntansi pemerintahan agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terutama pada bagian keuangan atau tata usaha.

4.3.4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Di dalam penelitian ini kompetensi sumber daya manusia yang dihubungkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen memperlihatkan nilai dari *original sample* dan *P-Value* adalah -0,250 dan 0,109. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis empat (H_4) ditolak. *original sample* bernilai -0,250 yang artinya variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara negatif dan *P-Value* bernilai sebesar 0,109 di mana *P-Value*

lebih dari 0,05 yang menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

Menilai tingkatan kompetensi diperlukan supaya dapat mengetahui kinerja yang diinginkan, dengan menentukan batas kompetensi yang dibutuhkan dapat dijadikan sebagai dasar proses seleksi, kesuksesan rencana, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia (Syarifudin, 2014). Pengertian kompetensi sendiri dalam penjelasan pasal 3 PP No. 101 Tahun 2000, kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki PNS seperti pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku untuk menjalankan tugasnya. Sehingga dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan penting agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi karakteristik kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengenai keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen belum mencukupi dan mampu memenuhi persyaratan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Mayoritas staf karyawan di pemerintahan daerah Kabupaten Kebumen bagian keuangan memiliki tingkat pendidikan sarjana yaitu sebesar 74,5% dengan latar pendidikan paling banyak yaitu manajemen dan akuntansi. Dalam rangka penerapan sistem akuntansi yang berbasis akrual berstandar akuntansi pemerintahan belum memadai di mana belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten terutama pada pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu merupakan faktor yang

menyebabkan tidak berpengaruhnya kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Palembang. Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Muda *et al.*, (2017) yang mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagian pengelolaan keuangan tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kriteria dan berkompoten dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

4.3.5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Di dalam penelitian ini didapatkan hasil variabel pemanfaatan teknologi informasi yang dihubungkan dengan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen menunjukkan nilai dari *original sample* sebesar 0,594 dan nilai dari *P-Value* sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis lima (H_5) diterima dikarenakan nilai *P-Value* yang sebesar 0,000 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dan *original ample* bernilai 0,594 dianggap

variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan, menyebutkan bahwa melanjutkan pelaksanaan proses pembangunan dengan prinsip *good government*. Maka dari itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga pemerintah daerah diwajibkan untuk memanfaatkan teknologi guna mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sudah dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah siap dengan kemajuan teknologi untuk menerapkan sistem informasi sehingga dapat mempermudah pekerjaan. Semua proses pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara komputerisasi tidak lagi secara manual. Komputer yang tersedia sudah cukup dan terhubung dengan jaringan internet, sehingga pengiriman informasi dan komunikasi antar pegawai dapat dilakukan secara maksimal. Pegawai pemerintah di

Kabupaten Kebumen dalam institusinya dapat memaksimalkan kemudahan teknologi informasi ini karena dapat memanfaatkan teknologi informasi yang sudah tersedia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradono dan Basukianto (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan Firdaus *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh. Dengan penerapan teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan sehingga penggunaan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membantu pengelolaan data agar cepat dan tepat.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Government Governance* (GGG), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang sudah ditunjukkan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian:

1. *Good government governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen. Semakin baik tata kelola pemerintahan yang dijalankan maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas.
2. Sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal yang dijalankan tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan
3. Standar akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian penerapan

standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4. Kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan tidak mempengaruhi atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian dengan kemudahan teknologi informasi yang telah disediakan dapat memengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan daerah yang disajikan.

5.2. Kontribusi dan Implikasi Penelitian

Sebagai kontribusi dan implikasi bagi ke depannya, diharapkan melalui penelitian ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi baru atau sebagai tambahan yang relevan bagi para akademisi ke depannya yang tertarik melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.
2. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pemerintah daerah khususnya bagi SKPD yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen ke depannya dalam mengetahui dan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpotensi untuk membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan.

5.3. Keterbatasan dan Saran Penelitian

5.3.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat keterbatasan yang mungkin dapat memengaruhi hasil penelitian yang dicapai. Berikut adalah merupakan keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Pada penelitian ini menggunakan data primer (langsung) dengan menggunakan kuesioner, sehingga persepsi responden yang menjadi dasar jawaban dari data yang diperoleh.
2. Penyebaran kuesioner yang dilakukan masih dalam masa pandemi bagi, sehingga hal ini menghambat dalam proses pengisian jawaban dan pengembalian kuesioner dalam penelitian.
3. Terdapat beberapa badan atau dinas yang menolak izin untuk melakukan penyebaran kuesioner sehingga tidak semua badan atau dinas dapat dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.

5.3.2. Saran Penelitian

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka berikut ini adalah saran untuk penelitian selanjutnya dan harapannya dapat lebih baik lagi:

1. Mengharapkan untuk peneliti selanjutnya agar tetap melakukan penelitian serupa dengan menambahkan variabel yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan seperti variabel akuntabilitas dan variabel dan komitmen organisasi

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan juga metode baru seperti survey atau wawancara langsung kepada responden sehingga dapat memperoleh data yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat pertanyaan kuesioner yang tidak ambigu atau rancu dan saat pendistribusian kuesioner harap untuk menjelaskan terlebih dahulu supaya tidak ada kesalahpahaman dalam item pertanyaan kuesioner.



DAFTAR PUSTAKA

- Amijaya, H. T. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan *Good Government Governance* Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Computech & Bisnis*, 13(2), 70–80.
- Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. *Analisis Administrasi Dan Kebijakan*, 3, 1–6.
- Cahyaningrum, E., Hoyyi, A., & Mukid, M. A. (2015). *Analisa Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Perusahaan Menggunakan Pendekatan Partial Least Square (Studi Kasus pada PT. Telkom Indonesia Divisi Regional Jawa Tengah-DIY dan Wilayah Telekomunikasi Semarang)*. 4(2004), 805–814.
- Firdaus, Nadirsyah, & Fahlevi, H. (2015). *Pengaruh kualitas sumber daya manusi pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kota Banda Aceh*. *Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 45–54.
- Ghozali, Imam; (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. http://slims.umn.ac.id/index.php?p=show_detail&id=19545
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*.

- Ghozali, Imam, & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WARPPLS 4.0*.
- Gustina, I. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64. <https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1658>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (Cengage Learning (ed.); 8th ed.). Annabel Ainscow. <https://doi.org/10.1002/9781119409137.ch4>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 1689–1699. [researchgate.net](https://www.researchgate.net)
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Hutapea, F. L., & Widyaningsih, A. (2019). Pengaruh *Good Government Governance* Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1426–1442. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.152>
- IAI. (2019). *CAFB IAI-Modul Akuntansi Keuangan by Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (z-lib.org).pdf*. Ikatan Akuntan Indonesia.

- Idawati, W., & Eleonora, L. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity*, 22(2), 153–172. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1367>
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). *Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance*. *Journal Of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v12i2.480>
- Kewo, C. L., & Tanor, L. A. O. (2020). Apakah *Good Government Governance* dan Pengendalian Intern dapat Memengaruhi Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik ? *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11, 26–27.

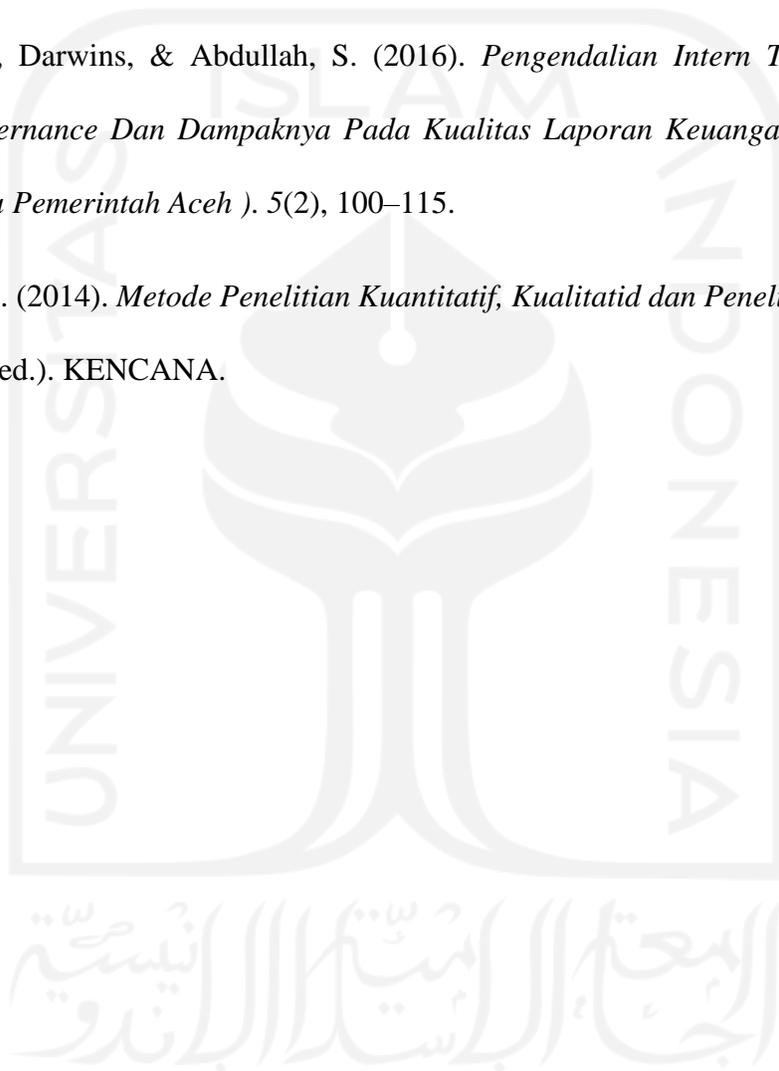
- Lewis, S. P., Thornhill, A., & K., M. N. (2019). Research Methods for Business Students. In *Synthese* (Vol. 195, Issue 5). https://www.amazon.com/Research-Methods-for-Business-Students/dp/1292208783/ref=sr_1_2?dchild=1&qid=1614706531&refinements=p_27%3AAdrian+Thornhill+%2F+Philip+Lewis+%2F+Mark+N.+K.+Saunders&s=books&sr=1-2&text=Adrian+Thornhill+%2F+Philip+Lewis+%2F+Mark+N.+K
- Maramis, M. M., Morasa, J., & Wokas, H. R. N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 563–570. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20685.2018>
- Muda, I., Wardani, D. Y., Erlina, Maksum, A., Lubis, A. F., Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). *The influence of human resources competency and the use of information technology on the quality of local government financial report with regional accounting system as an intervening*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 95(20), 5552–5561. www.jatit.org
- Nabila, Z., Cahyono, D., & Maharani, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 137–146. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i2.372>

- Nugraeni, dan Budiantara, M. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 18–32.
- Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Memengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 1–13.
- Pujihastuti, isti. (2010). Isti Pujihastuti Abstract. *Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian*, 2(1), 43–56.
- Putra, D. P. (2018). Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Ilmiah STIE MDP*, 7(2), 82–196.
- Ramadhan, P. R., & Alpi, M. F. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 3(02), 147–153. <https://doi.org/10.35915/accountia.v3i02.381>
- Rokhlinasari, S., & Hidayat, A. (2016). Al-Amwal, Volume 8, No. 2 Tahun 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank Bjb Syariah Cirebon*, 8(2), 491–508.

- Setiawan, I. W. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 671–700.
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.32400/iaj.26622>
- Siwambudi, I. G. N., Yasa, G. W., & Badera, I. D. N. (2017). Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1, 385–416.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen) Akhmad Syarifudin. *Jurnal Fokus Bisnis*, Volume 14, No 02, Desember 2014, 14(25), 26–44.
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance (GGG) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus

- Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat dan Banten). *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v2i1.975>
- Udiyanti, N. L. N. A., Atmadja, A. T., & Darmawan, N. A. S. (2014). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)*. 2(1).
- Vidyasari, F. N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 2–24.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). *Pengaruh kompetensi sdm, penerapan sap, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah 1. 2*.
- Widaryani, H. U., & Kiswanto. (2020). Analysis of Factors Affecting the Quality of Local Government Financial Statements. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 53–59. <https://doi.org/10.15294/aaj.v9i1.23123>
- Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.18196/rab.020116>

- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan. *Jurnal Bisnis & Ekonomi, Volume 14*,(1), 56–64.
- Yusniyar, Darwins, & Abdullah, S. (2016). *Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Skpa Pemerintah Aceh). 5*(2), 100–115.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (1st ed.). KENCANA.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian



Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Perihal: Mohon Bantuan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr Responden
Di Tempat
Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian untuk penyusunan tugas akhir Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen”.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan untuk kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan mengisi secara objektif kuesioner terlampir. Partisipasi Bapak/Ibu/sdr akan sangat membantu dalam keberhasilan penelitian ini.

Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Valdo Maggri Alani

Mahasiswa

KUESIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk mengisi identitas secara lengkap (kecuali nama dan jabatan boleh tidak diisi). Setiap pertanyaan diharapkan hanya ada satu jawaban untuk menjamin validitas data.

- Nama : (boleh tidak diisi)
- Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
- Umur (tahun) : < 25 th 25-35 th 36-45 th 45-55 th
 > 55 th
- Gelar/Starta : D3 S1 S2 S3 lainnya
- Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi Manajemen Hukum
 Ilmu Politik Administrasi Publik
 Lainnya, sebutkan
- Lama Bekerja di PEMDA : <1 th 1-5 th 6-10 th >10 th
- Jabatan / Pangkat : (boleh tidak diisi)
- Nama OPD :

Petunjuk Pengisian

Format Skala Responden

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Agak Tidak Setuju (ATS)
4. Agak Setuju (AS)
5. Setuju (S)
6. Sangat Setuju (SS)

Peneliti mengharapkan Bapak dan Ibu memilih salah satu (1/2/3/4/5/6) dengan memberi tanda **cross (X)**, terkait dengan pertanyaan yang diberikan sesuai dengan kondisi dalam unit kerja Bapak/Ibu.

DAFTAR PERTANYAAN

Good Governmnet Governance (Tata kelola pemerintah yang baik)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5	6
Bertanggungjawab							
1	OPD tempat saya bekerja selalu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menyusun kebijakan.						
2	OPD tempat saya bekerja selalu merespon apabila terjadi keluhan masyarakat terkait dengan program kegiatan sesuai dengan tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya.						
3	OPD tempat saya bekerja selalu menyelesaikan setiap keluhan masyarakat sesuai dengan tupoksinya dengan tepat waktu.						
Transparansi							
4	Peningkatan sistem komunikasi tiap-tiap organisasi dengan masyarakat dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat adalah penting.						
5	Penggunaan dana disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.						
6	Melakukan sosialisasi program dan kebijakan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.						
Integritas dan Kepatuhan Hukum							
7	OPD tempat saya bekerja mengikutsertakan pegawai dalam membuat kebijakan.						
8	OPD tempat saya bekerja memberlakukan hukum yang telah dibuat kepada seluru pegawai.						
Efisiensi dan Efektivitas							

9	OPD tempat saya bekerja dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan berdasar prinsip efektivitas.						
10	OPD tempat saya bekerja selalu bekerja menggunakan prinsip efisiensi.						

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5	6
Lingkungan Pengendalian							
1	OPD tempat saya bekerja memiliki peraturan yang mengatur masalah etika perilaku dalam melakukan suatu pengendalian.						
2	Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau perilaku pegawai.						
3	Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian internal.						
Penilaian Risiko							
4	Pemimpin telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.						
5	Risiko pelaksanaan program dan kegiatan telah diidentifikasi di tiap tingkatan.						
6	Pemimpin mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko						
Aktivitas Pengendalian							

7	Pemimpin selalu memiliki rencana pengelolaan pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi						
8	Pemimpin dan pegawai telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian.						
Informasi dan Komunikasi							
9	OPD tempat saya bekerja telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi untuk melaksanakan tanggung jawab.						
10	OPD tempat saya bekerja menyediakan informasi tepat waktu, memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat.						
11	OPD tempat saya bekerja membebankan tugas dan mengkomunikasikan kepada pegawai dengan jelas dan mudah dipahami.						
Pemantauan Pengendalian Internal							
12	OPD tempat saya bekerja telah melakukan perbaikan pengendalian internal sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian internal.						
13	Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja selalu mengevaluasi dan mereview temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu adanya perbaikan.						
14	Pemimpin pada OPD tempat saya bekerja menetapkan tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan dengan tepat.						

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5	6
Kerangka Konseptual							
1	OPD tempat saya bekerja menggunakan basis akrual dan basis kas dalam laporan keuangan pemerintah.						
2	OPD tempat saya bekerja melakukan pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara kronologis.						
3	OPD tempat saya bekerja melakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos yang semestinya.						
Penyajian Laporan Keuangan							
4	OPD tempat saya bekerja menerapkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.						
5	OPD tempat saya bekerja menerapkan basis akrual untuk mengakui asset.						
6	OPD tempat saya bekerja menerapkan basis akrual untuk mengakui kewajiban.						
7	OPD tempat saya bekerja menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan dan belanja.						
Koreksi Kesalahan							
8	OPD tempat saya bekerja melakukan koreksi sebagai tindakan pembetulan supaya pos- pos yang tersaji sesuai dengan semestinya.						
9	OPD tempat saya bekerja melakukan koreksi terhadap kesalahan yang telah ditemukan.						
Laporan Realisasi Anggaran							

10	OPD tempat saya bekerja mencatat pendapatan sesuai dengan asset bruto						
11	OPD tempat saya bekerja saat terjadi pengeluaran dari rekening kas maka mengakuinya sebagai belanja						
12	OPD tempat saya bekerja mengakui penerimaan pembiayaan saat diterima di rekening kas.						

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5	6
Pengetahuan							
1	Saya memahami PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dengan baik.						
2	Saya memiliki pemahaman terhadap peraturan dan standar pelaporan keuangan memengaruhi kualitas informasi.						
3	Saya memahami pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi dengan baik.						
Keterampilan							
4	Saya mampu membuat jurnal untuk setiap transaksi dengan tepat berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.						
5	Saya mampu memposting jurnal ke buku besar berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.						
6	Saya mampu menyusun dan menyajikan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas						

	Laporan Keuangan dengan baik berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.						
Sikap dan Perilaku							
7	Saya mengetahui kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas.						
8	Saya menolak intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap aturan.						
9	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.						

Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5	6
Komputer							
1	OPD tempat saya bekerja memiliki komputer dan jaringan internet dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas.						
2	OPD tempat saya bekerja melakukan proses akuntansi secara komputerisasi.						
3	OPD tempat saya bekerja mengelola data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.						
4	Komputer pada OPD tempat saya bekerja terdapat antivirus untuk sistem keamanan komputer dan diperbaharui secara rutin.						
5	OPD tempat saya bekerja menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara rutin.						

Jaringan Internet							
6	OPD tempat saya bekerja telah memanfaatkan jaringan internet di unit sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang diperlukan.						
7	OPD tempat saya bekerja untuk jaringan internet selalu dalam kondisi lancar untuk digunakan.						

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5	6
Relevan							
1	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPD tempat saya bekerja mampu memberikan informasi yang dapat mengevaluasi kinerja di masa lalu.						
2	OPD tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.						
3	OPD tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap mencakup semua informasi akuntansi.						
4	OPD tempat saya bekerja memberikan informasi laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.						
Andal							
5	Transaksi yang disajikan oleh OPD tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.						
6	Informasi yang disajikan dalam OPD tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material.						
7	OPD tempat saya bekerja menyajikan informasi sebagai kebutuhan umum dan						

	tidak berpihak pada pemangku kepentingan.						
8	OPD tempat saya bekerja informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji.						
9	Informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh OPD tempat saya bekerja teruji kebenarannya.						
Dapat Dibandingkan							
10	Informasi keuangan yang disajikan oleh OPD tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.						
Dapat Dipahami							
11	Informasi keuangan yang dihasilkan oleh OPD tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna.						

Lampiran 2 Daftar Rekapitulasi Jawaban Responden

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												
Res.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Total
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
2	6	6	6	6	5	5	5	6	5	6	6	62
3	6	6	6	5	5	5	5	5	5	6	6	60
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
9	5	5	5	6	6	5	6	5	5	5	5	58
10	5	5	6	6	5	5	6	5	5	5	5	58
11	6	6	6	6	6	5	6	5	5	6	6	63
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
15	5	4	5	5	5	6	6	5	5	5	5	56
16	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
17	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6	6	59
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	57
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
20	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	64
21	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	64
22	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6	62
23	6	6	6	6	6	2	6	5	6	5	6	60
24	5	5	6	6	6	3	5	6	5	5	5	57
25	5	5	5	5	5	2	2	2	2	5	5	43
26	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	6	58
27	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	59
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	57
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	57
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												
Res.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Total
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
34	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	57
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	57
36	5	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	63
37	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
39	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	38
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
44	5	5	5	5	6	6	5	5	6	5	6	59
45	6	6	5	6	5	4	5	6	6	5	6	60
46	6	6	6	5	5	6	6	6	5	6	6	63
47	5	4	6	6	6	5	6	6	6	5	6	61
48	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
49	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	57
50	6	6	5	5	5	5	6	6	6	5	6	61
51	6	6	6	6	5	5	6	5	6	6	6	63
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	57
53	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	52
54	4	3	4	3	3	4	4	4	4	5	5	43
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
56	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	53
57	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	53
58	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	50
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
60	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	40
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
62	5	5	5	5	5	4	5	5	5	6	6	56
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
64	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	56
65	6	6	5	5	5	6	6	5	5	5	5	59

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												
Res.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Total
66	5	5	6	6	5	5	5	5	5	6	6	59
67	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	18
68	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	57
69	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	65
70	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	65
71	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	54
72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
73	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	56
76	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
79	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
81	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
82	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	54
83	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	54
84	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	53
85	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
86	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	52
87	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	53
88	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56
89	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	56
90	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
91	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	6	57
92	6	5	6	6	6	4	5	5	4	6	6	59
93	6	5	5	5	6	4	5	5	4	6	6	57
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
98	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	57

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												
Res.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Total
99	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
100	6	6	6	6	5	5	5	5	6	5	6	61
101	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
102	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
103	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
104	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
105	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
106	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
107	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
108	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
109	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	65
110	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55

Good Government Governance											
Res.	GG1	GG2	GG3	GG4	GG5	GG6	GG7	GG8	GG9	GG10	Total
1	5	5	4	5	2	4	4	5	5	5	44
2	6	3	5	5	5	5	5	6	6	5	51
3	5	3	5	6	5	5	5	6	5	5	50
4	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51
5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51
6	4	5	5	5	3	3	4	5	5	5	44
7	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	47
8	5	4	5	4	4	5	5	5	5	6	48
9	6	5	5	6	5	5	6	6	5	6	55
10	6	6	5	6	5	6	6	5	6	6	57
11	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	51
12	5	5	6	6	5	5	5	6	5	5	53
13	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	52
14	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	45
15	6	4	4	5	5	5	4	4	4	4	45
16	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	51

<i>Good Government Governance</i>											
Res.	GG1	GG2	GG3	GG4	GG5	GG6	GG7	GG8	GG9	GG10	Total
17	6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	52
18	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	51
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
20	6	5	5	6	6	5	5	5	5	5	53
21	6	6	5	6	6	6	6	6	6	5	58
22	5	5	5	5	6	6	4	5	4	4	49
23	5	5	6	5	5	5	6	6	6	5	54
24	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	55
25	6	6	5	5	6	6	5	5	6	5	55
26	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	46
27	6	5	5	5	6	6	5	5	5	5	53
28	5	5	6	6	5	5	5	5	5	6	53
29	5	6	5	6	6	5	5	6	5	5	54
30	5	6	5	6	5	5	5	6	5	5	53
31	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
34	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	52
35	5	5	6	5	5	5	6	5	5	6	53
36	5	6	5	5	6	5	6	5	5	5	53
37	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
39	6	5	5	6	5	4	5	5	4	5	50
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
41	5	5	5	5	6	4	5	5	4	4	48
42	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	58
43	6	5	6	5	6	6	5	6	6	6	57
44	5	5	5	6	5	6	5	5	5	5	52
45	5	6	5	5	5	5	5	5	5	6	52
46	5	5	6	6	6	4	5	5	5	5	52
47	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
48	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
49	5	5	5	5	5	6	5	5	5	4	50

50	5	5	5	6	6	5	5	5	4	5	51
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

<i>Good Government Governance</i>											
Res.	GG1	GG2	GG3	GG4	GG5	GG6	GG7	GG8	GG9	GG10	Total
51	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	59
52	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	53
53	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	47
54	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	47
55	5	5	6	5	5	6	5	5	5	6	53
56	5	5	5	6	6	6	5	6	5	5	54
57	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	51
58	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	52
59	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	52
60	4	5	4	5	3	5	5	5	4	4	44
61	6	5	5	6	5	5	6	6	5	5	54
62	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	48
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
64	5	6	6	5	6	6	5	5	5	5	54
65	5	5	5	6	5	6	5	5	5	5	52
66	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	52
67	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	15
68	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
69	4	5	5	5	6	5	5	5	6	5	51
70	6	6	5	6	6	6	5	6	6	6	58
71	6	5	5	5	4	5	5	5	5	5	50
72	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
73	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
75	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51
76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
79	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
80	5	5	5	6	5	5	2	5	5	5	48
81	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60

82	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51
83	6	6	5	6	5	6	5	5	5	5	54

<i>Good Government Governance</i>											
Res.	GG1	GG2	GG3	GG4	GG5	GG6	GG7	GG8	GG9	GG10	Total
84	5	6	5	6	6	5	5	5	5	5	53
85	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
86	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48
87	5	5	5	6	5	5	4	4	5	5	49
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
90	5	6	6	6	6	6	6	5	6	6	58
91	5	5	5	5	5	6	5	5	4	5	50
92	6	6	6	6	5	6	6	6	5	6	58
93	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	51
94	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
98	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	51
99	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51
100	5	6	6	5	6	6	6	5	5	6	56
101	6	6	5	5	6	5	5	5	3	5	51
102	5	5	6	5	5	5	4	5	3	4	47
103	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
104	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
105	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
106	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	53
107	5	5	5	6	5	5	6	6	5	6	54
108	6	6	5	6	6	6	6	6	6	5	58
109	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
110	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

Sistem Pengendalian Internal

Res .	SPI 1	SPI 2	SPI 3	SPI 4	SPI 5	SPI 6	SPI 7	SPI 8	SPI 9	SPI1 0	SPI1 1	SPI1 2	SPI1 3	SPI1 4	Tota l
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
2	6	6	5	5	6	6	5	5	6	5	5	6	5	5	76
3	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	71
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	69
6	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	64
7	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	64
8	5	5	5	5	5	5	6	5	6	5	4	6	6	5	73
9	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	4	6	6	6	74
10	6	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	5	5	74
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
12	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
14	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	63
15	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	63
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	71
21	5	5	5	6	6	6	5	6	6	5	5	5	5	6	76
22	6	6	5	4	5	4	4	4	3	3	2	2	2	2	52
23	5	5	5	6	6	6	5	6	6	5	5	5	5	5	75
24	5	6	5	5	6	5	5	6	5	6	5	5	5	5	74
25	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	5	5	5	5	75
26	5	5	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	47
27	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	72
28	6	6	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	74
29	5	5	5	6	6	5	4	5	5	6	5	5	5	6	73
30	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	5	5	5	72
31	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	69
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70

34	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	4	5	6	6	73
Sistem Pengendalian Internal															
Res	SPI	SPI1	SPI1	SPI1	SPI1	SPI1	Tota								
.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	1
35	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	6	6	72
36	6	6	6	5	6	6	5	5	5	6	6	6	6	5	79
37	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	84
38	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	67
39	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	64
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
41	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	65
42	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	84
43	5	6	6	5	5	5	6	6	5	5	5	6	6	6	77
44	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	6	5	6	6	69
45	6	6	6	5	5	5	2	5	5	5	5	6	5	5	71
46	6	6	5	6	6	6	6	6	6	5	6	5	6	6	81
47	6	6	5	5	5	5	4	6	5	5	4	5	6	6	73
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
49	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	6	6	5	74
50	5	5	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	5	79
51	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	5	5	5	6	80
52	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	6	5	5	6	70
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5	64
54	5	4	4	3	4	3	5	4	5	4	4	5	5	5	60
55	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	71
56	5	4	5	5	5	5	4	6	5	6	5	5	5	5	70
57	4	4	5	5	5	5	5	6	4	5	5	5	5	5	68
58	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	6	5	5	5	70
59	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71
60	5	4	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	59
61	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	5	72
62	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	6	6	70
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
64	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	73
65	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	72
66	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71

67	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	21
68	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70



Sistem Pengendalian Internal

Res .	SPI 1	SPI 2	SPI 3	SPI 4	SPI 5	SPI 6	SPI 7	SPI 8	SPI 9	SPI1 0	SPI1 1	SPI1 2	SPI1 3	SPI1 4	Tota l
69	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6	6	80
70	6	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	6	6	81
71	5	5	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	72
72	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	65
73	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	84
74	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	74
75	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	72
76	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	76
77	5	6	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	6	6	77
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
79	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	68
80	5	5	5	5	5	5	5	2	5	4	5	5	5	5	66
81	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	84
82	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	68
83	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	71
84	5	5	5	4	5	5	5	5	6	5	5	5	4	5	69
85	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
86	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	64
87	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	65
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
89	5	4	5	5	5	5	4	5	5	6	4	5	5	4	67
90	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	76
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
92	4	5	6	6	5	6	4	6	6	5	6	6	6	4	75
93	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	6	6	4	67
94	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	67
95	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	67
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
98	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	67
99	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	67
100	5	5	6	5	5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	75
101	5	6	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	70

102	4	5	5	5	6	5	5	5	5	4	5	5	5	5	69
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sistem Pengendalian Internal															
Res .	SPI 1	SPI 2	SPI 3	SPI 4	SPI 5	SPI 6	SPI 7	SPI 8	SPI 9	SPI1 0	SPI1 1	SPI1 2	SPI1 3	SPI1 4	Tota 1
103	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	84
104	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	68
105	5	5	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	69
106	6	6	6	6	5	6	5	5	5	6	6	6	5	6	79
107	6	6	6	6	5	6	5	5	6	6	6	6	5	6	80
108	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	79
109	5	5	5	5	6	6	5	5	5	6	6	5	6	6	76
110	5	6	6	5	5	5	6	6	5	5	4	4	6	6	74

Standar Akuntansi Pemerintahan														
Res.	SAP1	SAP2	SAP3	SAP4	SAP5	SAP6	SAP7	SAP8	SAP9	SAP1 0	SAP1 1	SAP1 2	Total	
1	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	56	
2	5	6	6	6	6	6	6	5	6	5	5	5	67	
3	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	57	
4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	58	
5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	55	
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	58	
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	57	
8	6	5	6	5	5	5	6	5	5	3	5	5	61	
9	5	5	6	6	5	5	6	5	5	3	5	5	61	
10	5	6	6	5	6	6	6	5	5	5	5	5	65	
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
12	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61	
13	5	5	5	4	5	6	6	6	6	5	5	5	63	
14	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	58	
15	5	5	5	6	6	5	5	4	4	5	5	5	60	

16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
19	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
20	5	5	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	68
21	6	6	6	5	6	6	5	5	6	5	6	6	68
22	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5	47
23	6	6	6	5	6	6	5	5	5	5	6	6	67

Standar Akuntansi Pemerintahan

Res.	SAP1	SAP2	SAP3	SAP4	SAP5	SAP6	SAP7	SAP8	SAP9	SAP10	SAP11	SAP12	Total
24	6	5	6	6	6	5	6	6	5	5	5	5	66
25	6	5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	5	65
26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
27	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	62
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
29	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	61
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
31	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
34	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
36	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	69
37	6	6	6	6	6	6	3	6	6	5	6	6	68
38	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	59
39	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	64
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
41	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	64
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
44	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	6	62
45	6	6	5	5	6	5	5	6	5	5	5	5	64
46	6	5	5	5	5	6	6	5	5	6	6	6	66
47	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
48	5	5	5	5	5	5	6	5	6	6	6	6	65

49	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	62
50	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	63
51	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	71
52	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	61
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	57
54	3	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	52
55	6	5	6	5	5	5	5	6	6	5	5	5	64
56	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4	5	56
57	5	5	5	5	5	4	5	2	4	5	4	5	54

Standar Akuntansi Pemerintahan

Res.	SAP1	SAP2	SAP3	SAP4	SAP5	SAP6	SAP7	SAP8	SAP9	SAP1 0	SAP1 1	SAP1 2	Total
58	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	56
59	6	5	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	63
60	3	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	51
61	6	5	5	5	6	6	6	5	5	4	4	4	61
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
64	6	5	5	5	6	6	6	5	5	5	4	4	62
65	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
66	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
67	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
68	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	62
70	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
71	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	59
72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
73	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
74	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	69
75	5	5	5	6	6	5	5	6	6	5	5	5	64
76	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	69
77	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	67
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
79	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

81	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
82	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	57
83	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61
84	5	5	6	5	5	5	4	4	5	5	5	5	59
85	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
86	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	57
87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	58
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
90	6	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	70

Standar Akuntansi Pemerintahan

Res.	SAP1	SAP2	SAP3	SAP4	SAP5	SAP6	SAP7	SAP8	SAP9	SAP10	SAP11	SAP12	Total
91	4	4	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	59
92	6	6	4	6	5	5	6	5	5	4	4	5	61
93	5	5	4	5	5	5	5	5	6	4	4	4	57
94	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	59
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
98	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	59
99	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	58
100	5	5	6	6	6	6	5	6	6	5	5	5	66
101	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	5	5	65
102	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	5	5	62
103	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
104	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
105	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
106	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
107	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
108	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
109	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	69
110	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

Kompetensi Sumber Daya Manusia										
Res.	SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5	SDM6	SDM7	SDM8	SDM9	Total
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
3	4	5	4	4	4	4	5	4	5	39
4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
6	5	4	4	5	5	4	5	5	5	42
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
8	6	5	5	5	5	5	6	5	6	48
9	6	6	6	5	5	5	6	5	6	50
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
11	4	4	4	5	5	5	5	6	6	44
12	4	4	4	5	4	6	5	6	6	44
13	4	4	4	6	5	5	5	6	6	45
14	5	4	4	4	4	4	5	5	5	40
15	5	4	4	5	4	4	5	5	5	41
16	4	4	4	5	5	5	5	6	6	44
17	4	4	4	4	5	5	6	6	6	44
18	4	4	4	5	5	5	5	6	6	44
19	5	6	6	5	5	5	6	6	6	50
20	5	6	5	5	5	5	6	6	6	49
21	5	5	6	6	6	6	6	6	6	52
22	3	3	4	3	4	2	2	3	3	27
23	5	5	5	6	6	6	6	6	6	51
24	6	5	6	6	6	6	6	6	6	53
25	6	6	5	6	6	6	6	6	6	53
26	2	2	2	2	2	2	2	1	2	17
27	6	5	5	6	5	5	5	5	5	47
28	6	6	5	5	5	4	5	5	5	46
29	6	5	5	5	5	4	6	5	6	47
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

34	4	5	4	5	5	4	6	5	6	44
35	4	5	3	5	5	4	5	6	5	42
36	5	6	5	5	5	5	6	6	6	49
37	5	5	5	5	5	5	6	6	6	48
38	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
39	5	6	6	5	5	5	5	4	4	45
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
41	6	6	6	6	6	5	5	4	4	48
42	5	5	5	5	5	5	6	6	6	48
43	6	6	6	5	5	5	5	5	5	48
44	5	5	5	5	4	4	6	5	5	44
45	5	5	6	5	5	6	6	5	5	48
46	5	5	5	6	6	5	5	5	6	48
47	6	5	5	5	4	5	6	4	6	46
48	6	6	6	5	5	5	5	5	5	48
49	5	5	6	5	5	5	5	5	5	46
50	6	6	6	5	6	5	5	5	5	49
51	5	5	6	5	5	4	6	6	6	48
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
53	5	5	2	2	5	5	5	5	5	39
54	2	3	3	2	2	2	5	4	5	28
55	4	4	4	5	5	4	5	5	5	41
56	1	2	1	2	2	2	6	6	6	28
57	2	2	2	2	2	3	5	5	6	29
58	4	4	3	4	3	2	3	3	3	29
59	4	4	4	4	5	4	5	5	5	40
60	2	2	2	2	2	2	4	4	4	24
61	5	5	5	5	5	6	6	6	6	49
62	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
64	5	5	5	5	5	6	6	5	6	48
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
66	5	5	5	4	4	5	5	5	5	43
67	2	1	2	2	2	1	1	2	1	14
68	4	3	5	5	4	5	5	5	5	41
69	5	5	5	5	5	5	6	4	5	45

70	6	6	6	6	6	5	6	6	6	53
71	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
72	4	5	4	4	4	4	5	5	5	40
73	4	4	4	4	4	4	6	6	6	42
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
76	5	5	5	5	5	5	6	6	6	48
77	5	5	5	5	6	5	5	5	6	47
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
79	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
80	5	5	5	2	2	5	5	5	5	39
81	6	6	6	6	6	5	6	6	6	53
82	5	4	5	5	5	5	5	5	6	45
83	5	5	5	4	4	4	6	6	6	45
84	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44
85	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
86	4	4	3	4	4	4	5	5	5	38
87	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
90	5	5	5	5	5	5	6	6	6	48
91	5	5	5	5	5	5	5	5	6	46
92	3	4	6	5	6	6	6	3	6	45
93	3	4	5	6	6	5	6	3	5	43
94	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
98	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43
99	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
100	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
101	3	5	5	4	4	4	6	5	6	42
102	3	4	5	4	4	4	5	5	5	39
103	5	5	5	5	5	5	6	6	6	48
104	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
105	4	4	4	4	5	4	5	5	5	40

106	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54
107	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54
108	6	6	6	6	6	5	6	6	6	53
109	5	5	5	5	5	5	6	5	6	47
110	4	4	5	4	5	4	5	4	5	40

Pemanfaatan Teknologi Informasi								
Res	PTI	Tota						
.	1	2	3	4	5	6	7	l
1	5	5	5	5	4	5	5	34
2	6	5	6	6	5	6	5	39
3	6	6	6	5	6	5	5	39
4	6	6	5	5	6	5	5	38
5	5	5	5	5	4	5	5	34
6	6	6	5	5	4	5	5	36
7	6	5	5	5	4	5	5	35
8	6	6	6	5	4	4	5	36
9	6	6	6	5	5	5	5	38
10	6	5	5	6	5	6	6	39
11	4	5	5	4	4	4	4	30
12	4	5	5	4	4	4	5	31
13	4	4	5	4	4	4	4	29
14	5	5	5	4	4	5	5	33
15	4	5	5	5	4	5	5	33
16	4	5	5	4	4	4	4	30
17	4	5	5	4	4	4	4	30
18	4	5	5	4	4	4	4	30
19	6	6	6	6	6	6	5	41
20	6	6	6	6	5	5	5	39
21	6	6	6	6	5	6	5	40
22	4	4	3	4	3	3	4	25
23	6	6	6	6	5	5	6	40
24	6	6	6	6	6	6	6	42
25	6	5	5	6	6	6	6	40
26	2	2	2	2	5	5	5	23

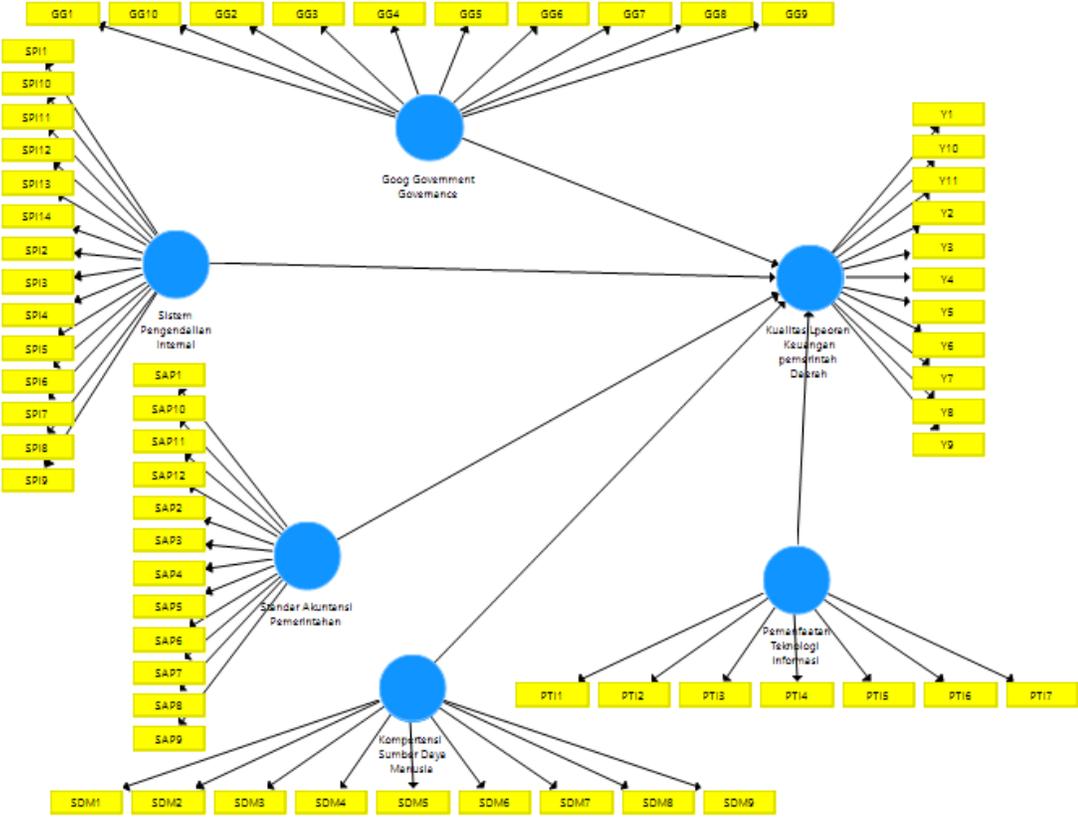
27	5	5	5	6	5	5	5	36
28	5	5	5	5	4	5	5	34
29	5	5	5	5	4	4	4	32
30	5	5	5	5	5	5	5	35
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	5	5	5	5	5	5	5	35
33	5	5	5	5	5	5	5	35
34	5	6	6	5	3	6	5	36
35	5	5	6	6	3	6	5	36
36	6	5	5	6	6	5	5	38
37	6	6	6	6	6	6	6	42
38	5	5	5	5	5	5	5	35
39	4	3	3	3	4	3	3	23
40	2	2	2	2	2	2	2	14
41	3	3	3	3	3	3	3	21
42	6	5	5	5	5	5	5	36
43	6	5	5	5	4	5	5	35
44	5	5	5	5	5	5	4	34
45	6	6	5	5	5	5	5	37
46	6	6	6	5	6	6	6	41
47	5	4	6	5	5	4	4	33
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	5	5	6	5	5	5	5	36
50	6	6	5	6	5	6	5	39
51	6	6	6	6	5	5	5	39
52	5	5	5	5	5	5	6	36
53	5	5	5	5	5	5	5	35
54	2	2	3	2	4	3	3	19
55	5	5	5	2	4	5	3	29
56	4	3	3	5	4	5	4	28
57	4	3	3	4	4	4	4	26
58	5	5	5	3	3	4	4	29
59	5	5	5	3	3	3	4	28
60	2	2	2	3	4	3	3	19
61	5	5	5	5	4	6	5	35
62	5	5	5	5	5	5	5	35

63	5	5	5	5	5	5	5	35
64	6	5	5	5	4	6	5	36
65	5	5	5	5	5	5	5	35
66	5	5	5	5	5	4	4	33
67	1	1	1	1	1	2	1	8
68	5	5	5	5	5	5	5	35
69	6	6	6	6	6	6	6	42
70	6	6	6	6	6	6	6	42
71	5	5	5	5	5	3	4	32
72	4	4	3	5	5	5	5	31
73	6	6	6	6	6	6	6	42
74	5	5	5	5	5	5	5	35
75	5	5	5	5	5	5	5	35
76	6	6	6	6	6	6	6	42
77	5	5	5	5	5	5	5	35
78	5	5	5	5	5	5	5	35
79	5	3	3	4	5	5	5	30
80	5	5	5	5	5	5	5	35
81	6	6	6	6	6	6	6	42
82	6	4	5	5	4	5	5	34
83	6	5	6	5	5	5	5	37
84	5	5	4	4	5	5	5	33
85	5	5	5	5	5	5	5	35
86	5	5	6	6	6	5	5	38
87	6	6	5	5	6	5	5	38
88	5	5	5	5	5	5	6	36
89	5	5	5	5	5	5	5	35
90	6	6	6	6	6	6	6	42
91	6	6	5	5	5	5	5	37
92	4	6	6	5	5	6	3	35
93	4	5	5	6	5	5	3	33
94	4	5	5	3	5	5	5	32
95	5	5	5	5	5	5	5	35
96	5	5	5	5	5	5	5	35
97	5	5	5	5	5	5	5	35
98	5	5	5	4	4	3	4	30

99	4	4	5	5	4	5	5	32
100	6	6	6	6	5	6	6	41
101	3	6	5	3	5	6	5	33
102	3	5	5	3	5	5	5	31
103	5	6	6	5	5	5	5	37
104	4	5	4	5	4	4	5	31
105	5	5	5	5	5	4	4	33
106	6	6	6	6	6	6	5	41
107	6	6	6	6	6	6	6	42
108	6	6	6	6	6	6	6	42
109	5	6	6	5	5	5	5	37
110	5	5	5	5	4	4	4	32

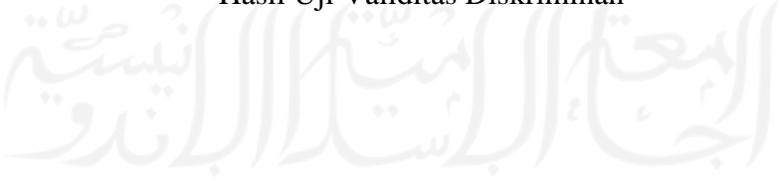


Lampiran 3 Hasil Olah Data



Model Penelitian

Hasil Uji Validitas Diskriminan

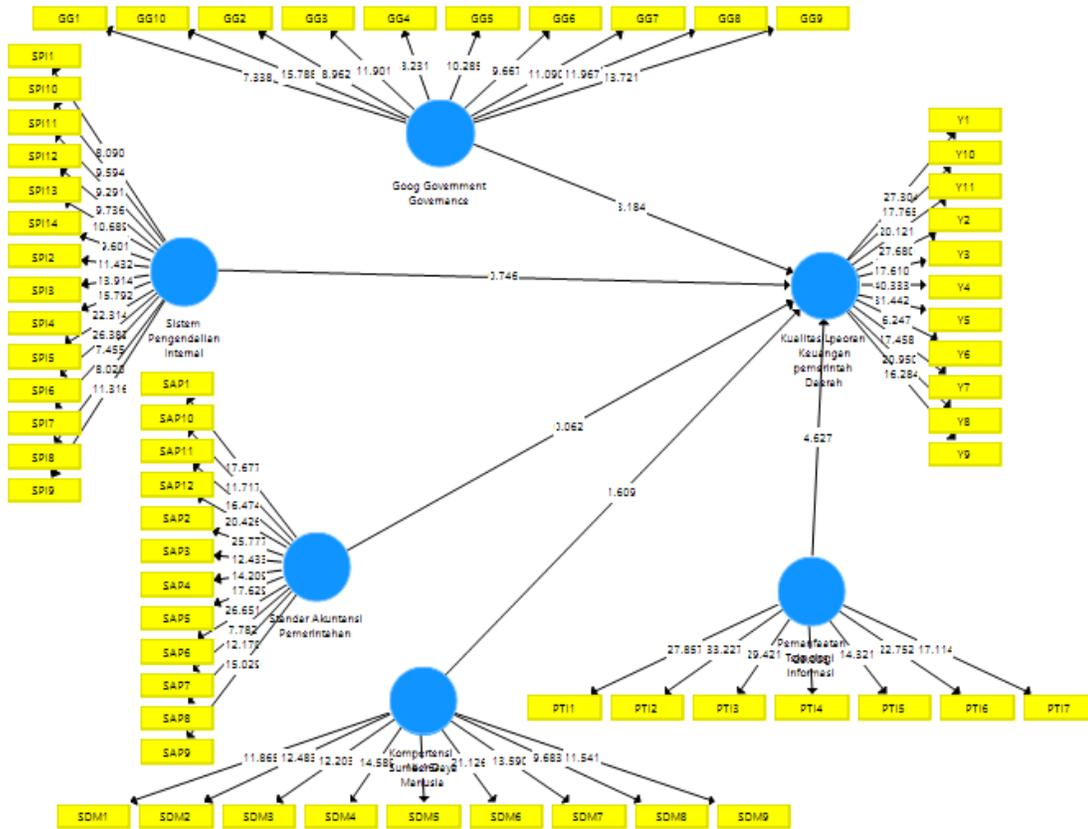


Indikator	Variabel					
	Good Governmen t Governance	Pemanfaata n Teknologi Informasi	Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi Sumber daya manusia	Sistem Pengendalia n Internal	Standar Akuntansi Pemerintaha n
Y1	0.664	0.764	0.891	0.646	0.693	0.620
Y2	0.712	0.791	0.915	0.625	0.756	0.644
Y3	0.678	0.733	0.871	0.598	0.692	0.617
Y4	0.727	0.778	0.913	0.619	0.721	0.647
Y5	0.752	0.764	0.918	0.617	0.729	0.644
Y6	0.479	0.460	0.695	0.324	0.515	0.438
Y7	0.631	0.621	0.873	0.434	0.641	0.518
Y8	0.655	0.699	0.901	0.519	0.694	0.610
Y9	0.690	0.663	0.876	0.546	0.706	0.645
Y10	0.689	0.624	0.879	0.465	0.659	0.532
Y11	0.733	0.644	0.895	0.489	0.687	0.572
GG1	0.767	0.522	0.565	0.578	0.650	0.618
GG2	0.796	0.493	0.542	0.546	0.655	0.604
GG3	0.843	0.540	0.634	0.542	0.741	0.635
GG4	0.814	0.497	0.631	0.540	0.685	0.621
GG5	0.720	0.494	0.580	0.507	0.625	0.579
GG6	0.782	0.477	0.635	0.395	0.605	0.518
GG7	0.842	0.535	0.613	0.604	0.769	0.682
GG8	0.854	0.553	0.668	0.604	0.794	0.697
GG9	0.825	0.682	0.686	0.641	0.785	0.682
GG10	0.872	0.671	0.692	0.671	0.809	0.722
SPI1	0.693	0.563	0.634	0.496	0.732	0.603
SPI2	0.699	0.694	0.748	0.587	0.780	0.652
SPI3	0.717	0.641	0.659	0.615	0.807	0.635
SPI4	0.688	0.634	0.646	0.660	0.813	0.674
SPI5	0.754	0.722	0.730	0.661	0.850	0.710
SPI6	0.737	0.749	0.733	0.722	0.871	0.756

SPI7	0.662	0.601	0.561	0.575	0.765	0.599
SPI8	0.773	0.568	0.597	0.609	0.784	0.653
SPI9	0.692	0.678	0.523	0.748	0.810	0.794
SPI10	0.727	0.618	0.574	0.707	0.790	0.754
SPI11	0.661	0.582	0.540	0.665	0.760	0.728
SPI12	0.662	0.652	0.560	0.738	0.806	0.778
SPI13	0.680	0.655	0.571	0.664	0.807	0.716
SPI14	0.685	0.629	0.540	0.697	0.807	0.789
SAP1	0.732	0.718	0.620	0.800	0.787	0.858
SAP2	0.718	0.704	0.638	0.761	0.797	0.908
SAP3	0.673	0.624	0.517	0.702	0.764	0.856
SAP4	0.684	0.623	0.510	0.728	0.751	0.878
SAP5	0.681	0.603	0.517	0.772	0.742	0.879
SAP6	0.687	0.656	0.577	0.788	0.780	0.909
SAP7	0.589	0.594	0.491	0.740	0.693	0.798
SAP8	0.594	0.658	0.533	0.757	0.691	0.807
SAP9	0.691	0.632	0.583	0.750	0.746	0.858
SAP10	0.635	0.554	0.564	0.608	0.692	0.822
SAP11	0.658	0.664	0.641	0.739	0.760	0.849
SAP12	0.717	0.684	0.702	0.731	0.792	0.877
SDM1	0.447	0.633	0.408	0.794	0.560	0.609
SDM2	0.547	0.678	0.458	0.843	0.647	0.705
SDM3	0.491	0.586	0.449	0.806	0.578	0.645
SDM4	0.494	0.604	0.461	0.840	0.608	0.655
SDM5	0.491	0.621	0.469	0.837	0.620	0.641
SDM6	0.522	0.660	0.481	0.879	0.625	0.654
SDM7	0.717	0.696	0.578	0.821	0.783	0.814
SDM8	0.565	0.614	0.514	0.747	0.675	0.743
SDM9	0.722	0.674	0.634	0.795	0.791	0.789
PTI1	0.593	0.878	0.642	0.727	0.723	0.667
PTI2	0.594	0.886	0.733	0.741	0.736	0.710
PTI3	0.645	0.874	0.727	0.764	0.765	0.751
PTI4	0.575	0.871	0.666	0.704	0.681	0.651
PTI5	0.544	0.782	0.627	0.556	0.623	0.589
PTI6	0.546	0.841	0.642	0.597	0.640	0.555
PTI7	0.547	0.854	0.672	0.611	0.651	0.561

Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	<i>rho_A</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.770	0.973	0.942	0.973
<i>Good Government Governance</i>	0.660	0.945	0.939	0.951
Sistem Pengendalian Internal	0.639	0.960	0.970	0.961
Standar Akuntansi Pemerintahan	0.738	0.971	0.939	0.971
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.670	0.943	0.968	0.948
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.732	0.941	0.939	0.950

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Konstruk



Output Ccalculate Bootstrapping

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.746	0.734

R-Square

Variabel	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Hasil
GGG -> KLKPD	0.446	0.401	0.134	3.332	0.001	Terdukung
SPI -> KLKPD	0.123	0.144	0.159	0.770	0.442	Tidak Terdukung
SAP -> KLKPD	-0.012	0.017	0.184	0.063	0.950	Tidak Terdukung
PTI -> KLKPD	0.594	0.555	0.139	4.264	0.000	Terdukung
KSDM -> KLKPD	-0.250	-0.220	0.156	1.606	0.109	Tidak Terdukung

Uji Inner Model